



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2018

**INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

KATA PENGANTAR



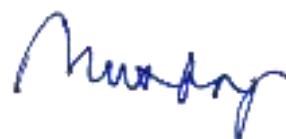
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat I Badan POM tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat I Badan POM dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Inspektorat I Badan POM tahun 2018 disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta membantu kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* di masa yang akan datang melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Jakarta, Februari 2019
Inspektur I Badan POM,



Drs. Mustofa, Apt., M.Kes

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat I Badan POM 2018 merupakan perwujudan akuntabilitas Inspektorat I sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta transparansi penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2018 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2018. Rencana Kinerja 2018 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat 2015-2019 yang telah direvisi berdasarkan restrukturisasi organisasi di Lingkungan Badan POM, dimana terjadi perubahan struktur organisasi Inspektorat menjadi Inspektorat Utama. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM pasal 365, Inspektorat I Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Inspektorat I memiliki 6 Sasaran Strategis, yaitu: (1) Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I; (2) Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor; (3) Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I; (4) Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I; (5) Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I dan (6) Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019.

Sasaran Strategis tersebut didukung oleh 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian sebagai berikut:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan sebesar 122,44%
2. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern dengan capaian sebesar 93,01% .
3. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan, dengan capaian sebesar 100%.

4. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja dengan capaian sebesar 110,12%.
5. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja dengan capaian sebesar 100%.
6. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material dengan capaian sebesar 100%.
7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM dengan capaian sebesar 97,9% .
8. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 108,23%.
9. Nilai AKIP Inspektorat I dengan capaian sebesar 96,55%.

Dari sembilan Indikator Kinerja Utama tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator dengan kriteria memuaskan dan capaian sasaran diatas 100% yaitu Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I; Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja dan Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti. Untuk kriteria Baik sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan, Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja dan Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material. Sedangkan 3 indikator yang tidak mencapai target atau berkriteria cukup adalah Indeks kepuasan mitra pengawasan intern, Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM serta Nilai AKIP Inspektorat I.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2018 untuk mencapai Sasaran Strategis dan IKU serta membiayai kegiatan lainnya, sebelum perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) Inspektorat I memperoleh anggaran Rp7.152.902.000,00 Sedangkan setelah perubahan SOTK memperoleh anggaran TA 2018 sebesar Rp8.101.668.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.504.094.894,00 atau 92,93%.

Laporan Kinerja Inspektorat I ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Inspektorat I Badan POM pada tahun 2018 dan untuk selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
B. ASPEK STRATEGIS.....	1
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....	4
E. ISU STRATEGIS	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. RENCANA STRATEGIS.....	11
A1. Visi.....	12
A2. Misi.....	12
A3. Tujuan.....	13
A4. Sasaran	14
A5. Arah Kebijakan dan Strategi	18
A6. Program	19
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	23
C. CARA MENGHITUNG CAPAIAN INDIKATOR.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
A1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	28
A2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	30
B. REALISASI ANGGARAN.....	61
C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	62
BAB IV PENUTUP	64
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat I Badan POM	3
Gambar 3. Komposisi SDM Inspektorat I Badan POM Berdasarkan Jabatan	4
Gambar 4. Komposisi SDM Inspektorat I Badan POM Berdasarkan Golongan	4
Gambar 5. Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Pendidikan	5
Gambar 6. Perbandingan Anggaran Antara SOTK Lama dan SOTK Baru	6
Gambar 7. Visi Inspektorat I Badan POM	12
Gambar 8. Misi Inspektorat I Badan POM	13
Gambar 9. Tujuan dan Indikator Tujuan	14
Gambar 10. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Jan- Feb 2018 (SOTK baru)	21
Gambar 11. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Mar-Jul & Agust-Des 2018 (SOTK baru)	22
Gambar 12. Rumus Perhitungan Persentase Capaian	27
Gambar 13. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	27
Gambar 14. Rumus Perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Standar Efisiensi (SE)	27
Gambar 15. Periode Perjanjian Kinerja Inspektorat I pada Tahun 2018	28
Gambar 16. Hasil Penelusuran Pengaduan Tahun 2018	31
Gambar 17. Perubahan Komponen Penilaian Survei	34
Gambar 18. Hasil Survei Kepuasan Mitra Inspektorat I Tahun 2018	34
Gambar 19. Delapan Area Perubahan Yang Diselenggarakan Asesor BPOM	36
Gambar 20. Ilustrasi Pencapaian Opini WTP dari BPK RI	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Operasional Indikator Januari – Februari 2018 (SOTK lama)	15
Tabel 2. Definisi Operasional Indikator Maret-Juli dan Agustus-Desember 2018 (SOTK baru).....	16
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan POM (Januari – Februari 2018).....	23
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Badan POM (Maret – Juli 2018).....	24
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Badan POM (Agustus – Desember 2018)	25
Tabel 6. Anggaran Inspektorat Badan POM Tahun 2018 Sebelum Perubahan SOTK.....	26
Tabel 7. Anggaran Inspektorat I Badan POM Tahun 2018 Setelah Perubahan SOTK.....	26
Tabel 8. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2018.....	29
Tabel 9. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-1.....	30
Tabel 10. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-2	33
Tabel 11. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-3	37
Tabel 12. Realisasi Rencana Aksi RB Program Penguatan Sistem Pengawasan	38
Tabel 13. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4	40
Tabel 14. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4 Indikator ke-1.....	41
Tabel 15. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4 Indikator ke-2.....	43
Tabel 16. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5	47
Tabel 17. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-1.....	48
Tabel 18. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-2.....	50
Tabel 19. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-3.....	53
Tabel 20. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-6	55
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 s.d. 2018 terhadap Target Renstra 2019	56
Tabel 22. Pencapaian Inspektorat Tahun 2017	57
Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2018 (SOTK Lama).....	61
Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2018 (SOTK Baru)	62
Tabel 25. Efisiensi Kegiatan Inspektorat I Tahun 2018.....	63
Tabel 26. Efisiensi Per Sasaran terhadap Anggaran.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 serta perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Kepala Badan POM no 26 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Melalui peraturan tersebut, Badan POM melakukan penguatan kelembagaan dengan menajamkan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan POM RI. Penguatan kelembagaan difokuskan salah satunya pada penguatan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pengembangan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama yang dipimpin oleh Eselon I dengan membawahi Inspektorat I dan Inspektorat II serta diferensiasi utama pada wilayah pengawasan.

B. ASPEK STRATEGIS

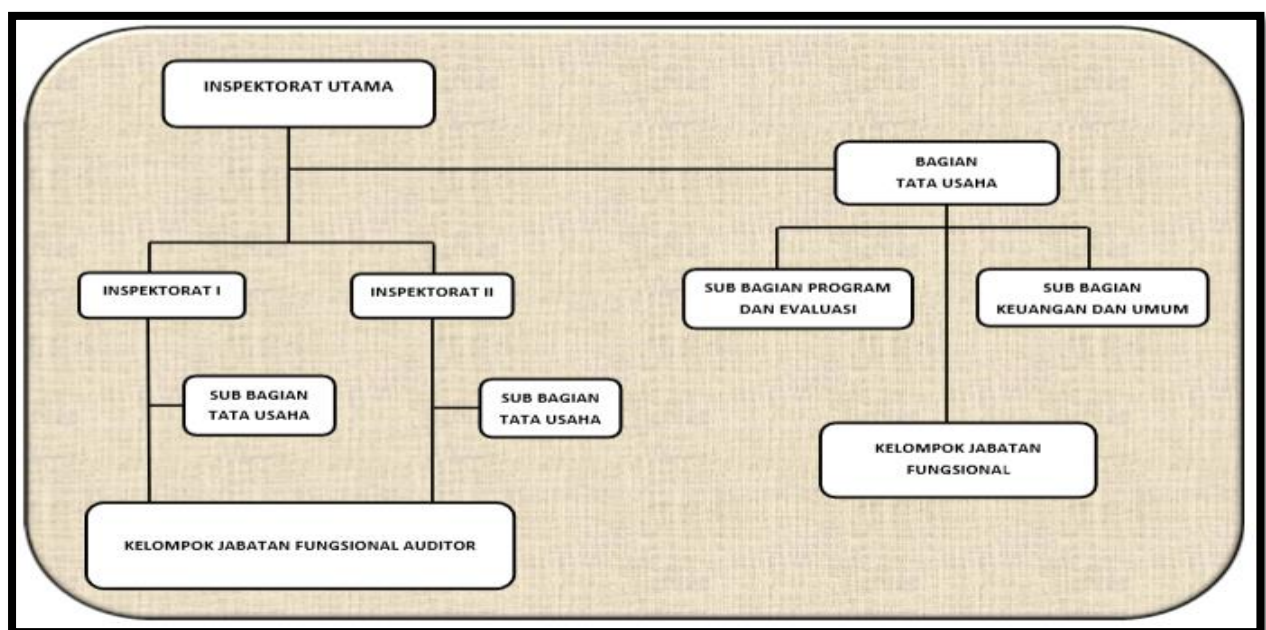
Seiring dengan perkembangan organisasi Badan POM, peran dan fungsi Inspektorat I Badan POM juga ikut berkembang. Penguatan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga fungsi pengawasan internal dalam organisasi Badan POM menjadi efektif dan dapat diandalkan. Sebagai pengawas intern, Inspektorat I menjadi mata dan telinga dari pimpinan dan dituntut untuk memberikan *early warning system* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, aparat pengawas intern diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). Aparat pengawas intern tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi

manajemen. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern sebagai *quality assurance*, *consultant* dan *trusted advisor* sehingga fokus pelaksanaan tugas pokok APIP mendampingi seluruh fungsi manajemen mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

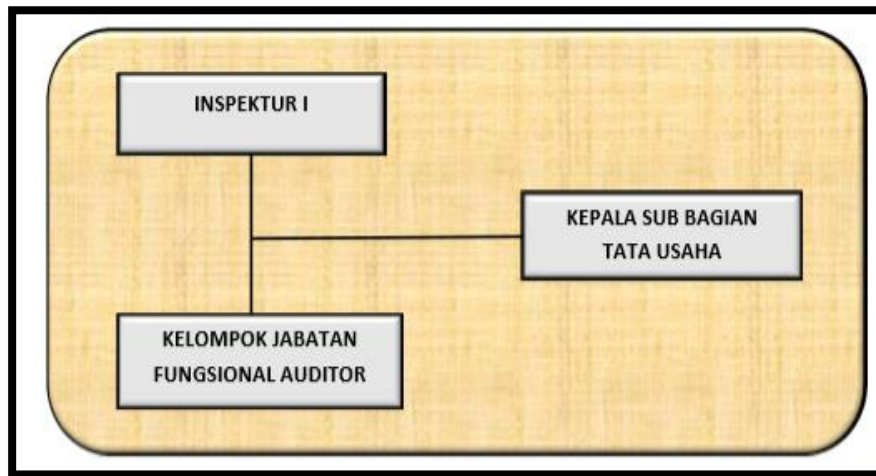
Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat I Badan POM secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Utama Badan POM. Kedudukan Inspektorat I Badan POM secara umum ditunjukkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dan berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Inspektorat I Badan Pengawas Obat

dan Makanan terdiri dari Inspektur I, Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana terlihat pada Bagan di bawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat I Badan POM

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; tugas pokok Inspektorat I Badan POM adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Sedangkan fungsi Inspektorat I Badan POM adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern
3. Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
4. Pelaporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

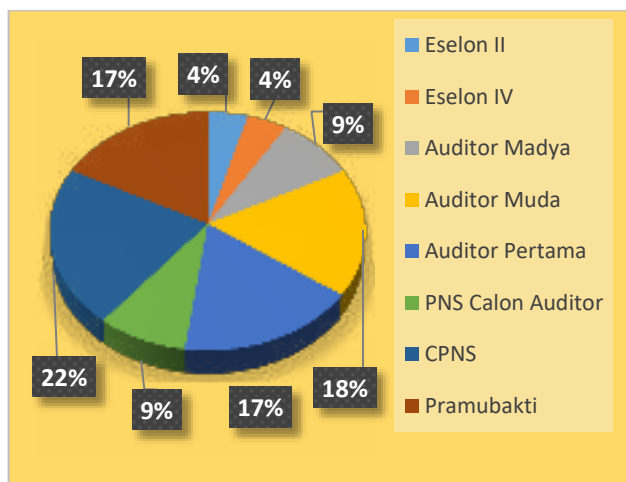
D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat I sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, sarana & prasarana, serta anggaran.

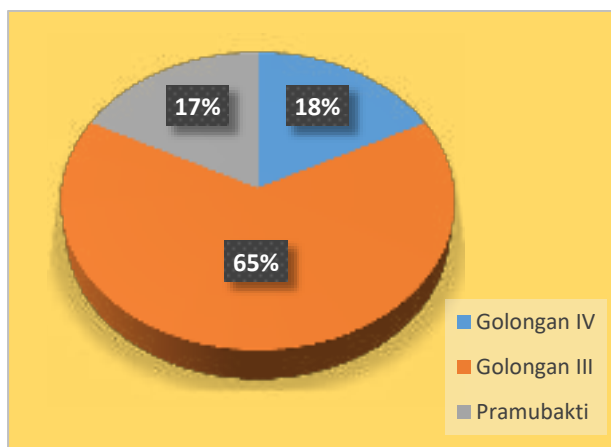
I. Internal

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

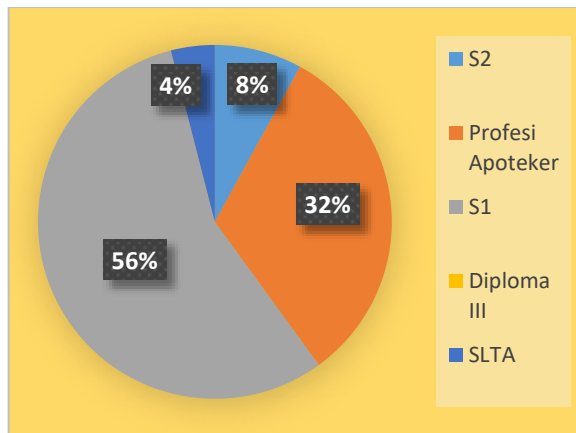
Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah pegawai Inspektorat I seluruhnya sebanyak 23 orang yang terdiri dari 1 (satu) Inspektur, 10 (sepuluh) auditor bersertifikat, 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 2 (dua) PNS calon auditor, 5 (lima) CPNS, dan 4 (empat) orang tenaga honorer.



Gambar 3. Komposisi SDM Inspektorat I Badan POM Berdasarkan Jabatan



Gambar 4. Komposisi SDM Inspektorat I Badan POM Berdasarkan Golongan



PENDIDIKAN	JUMLAH
S3	- Orang
S2	2 Orang
Profesi Apoteker	8 Orang
S1	14 Orang
Diploma III	0 Orang
SLTA	1 Orang

Gambar 5. Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Pendidikan

Inspektorat I telah menghitung kebutuhan pegawai untuk jabatan fungsional auditor dibandingkan dengan beban kerjanya, yaitu:

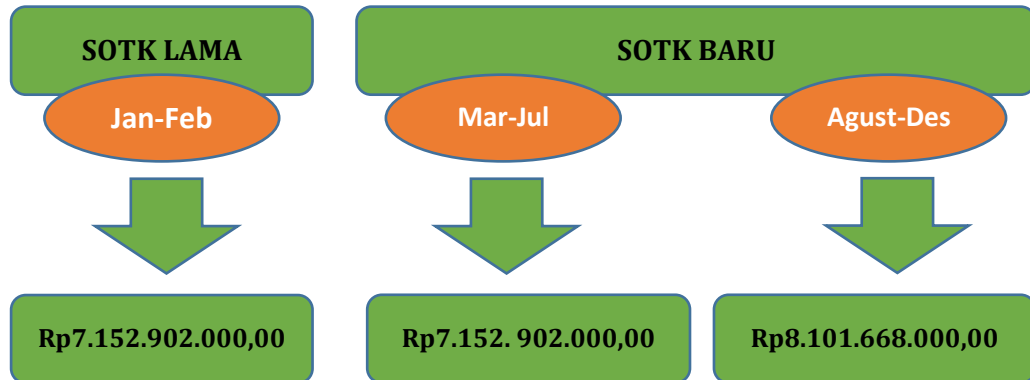
- a) Kebutuhan pegawai untuk jabatan auditor utama adalah sebanyak 1 orang, namun pada saat ini belum ada pegawai yang menduduki jabatan tersebut.
- b) Untuk jabatan auditor madya (Pengendali Teknis) dibutuhkan pegawai sebanyak 3 (tiga) orang. Pada tahun 2018, 2 orang yang menduduki jabatan auditor madya.
- c) Untuk jabatan auditor muda (Ketua Tim), formasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 9 (Sembilan) pegawai. Saat ini, 4 pegawai yang menduduki jabatan tersebut.
- d) Untuk jabatan auditor pertama ataupun auditor terampil (Anggota Tim) dibutuhkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pegawai, sedangkan saat ini jumlah personil yang menduduki jabatan auditor pertama sebanyak 4 orang. Saat ini posisi anggota tim ditambah dengan calon auditor sebanyak 7 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 16 (enam belas) pegawai untuk menduduk posisi jabatan auditor pertama.

2) Sarana dan Prasarana

Tahun 2018 Inspektorat I menempati Gedung I lantai 2 Badan POM dengan sarana dan prasarana yang masih bergabung dengan Inspektorat II. Namun dengan adanya pembangunan gedung yang sedang dilaksanakan di Lingkungan Badan POM, dan penambahan belanja modal diharapkan sarana dan prasarana Inspektorat I lebih memadai.

3) Anggaran

Anggaran Inspektorat I Badan POM tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. Perbandingan Anggaran Antara SOTK Lama dan SOTK Baru

II. Eksternal

Lingkup wilayah pengawasan Inspektorat I meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan Badan POM yang meliputi :

- Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
- Sekretariat Utama
- Pusat
- Inspektorat II, dan
- Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi:
 - Aceh
 - Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - Gorontalo
 - Jambi
 - Jawa Barat
 - Jawa Timur
 - Kalimantan Tengah
 - Kalimantan Timur
 - Kalimantan Utara
 - Lampung
 - Nusa Tenggara Barat
 - Sulawesi Tengah
 - Sumatera Selatan

E. ISU STRATEGIS

Inspektorat I sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh Badan POM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM yang bersifat strategis, antara lain:

1) Manajemen Risiko SPIP terintegrasi dengan ISO 9001:2015

Manajemen Risiko di lingkungan Badan POM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM, yang mana seluruh Satker/ Unit Kerja Pusat dan BB/ BPOM diwajibkan untuk melaksanakan Manajemen Risiko.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi APIP yang merupakan fungsi dari lini ketiga dalam *three lines of defence*, implementasi Manajemen Risiko dari masing-masing Satker/ Unit Kerja dan BB/ BPOM masih terdapat beberapa kelemahan antara lain :

- 1) Satker/ Unit Kerja dan BB/ BPOM belum memahami secara komprehensi implementasi integrasi Manajemen Risiko dengan ISO 9001:2015.
- 2) SDM yang menangani Manajemen Risiko belum mempunyai kompetensi yang memadai di bidang Manajemen Risiko.
- 3) Penyamaan persepsi implementasi Manajemen Risiko yang belum dilakukan sesuai ketentuan.
- 4) Belum terdapat standar selera risiko/ batas toleransi risiko dari pimpinan di lingkungan Badan POM

2) Gerakan Nasional Sapu Bersih Pungutan Liar (Gerakan Nasional Saber Pungli)

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Badan POM telah menindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.1.6.11.16.4051 Tahun 2016 tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Badan POM. Dalam hal ini, Inspektorat selaku Ketua Pelaksana Sapu Bersih Pungutan Liar di

Lingkungan Badan POM harus mampu mengkoordinasikan seluruh aktivitas pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar dalam rangka keberhasilan gerakan ini

3) *Internal Audit Capability Model (IACM)*

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Berdasarkan *assessment* atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM), akan diperoleh gambaran mengenai *area of improvement* dari masing-masing APIP.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2017 perihal kapabilitas Inspektorat Badan POM, Inspektorat Badan POM telah berada pada level 3 oleh karena perlu roadmap/rencana tindak peningkatan kapabilitas menuju ke level selanjutnya.

4) Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan pemantauan pelayanan publik yang dilaksanakan Menpan, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Inspektorat I mengkoordinir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
 2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
 4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- 5) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu Penerapan PIPK oleh APIP.

6) Fraud Control Plan

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi fraud khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Transformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi, yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek

manusia, institusi dan sosial budaya. Fraud Control Plan (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Untuk itu, Inspektorat Utama perlu mendorong untuk implementasi FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun regulatory specific.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu perubahan yang ada pada Peraturan tersebut adalah **transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama** yang dipimpin oleh Eselon I dengan membawahi Inspektorat I dan Inspektorat II serta diferensiasi utama pada wilayah pengawasan.

Inspektorat I Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM pasal 365 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I (**Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan**).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkup wilayah Inspektorat I.
- Penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup wilayah Inspektorat I.
- Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup wilayah Inspektorat I.
- Pelaporan hasil pengawasan.
- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

A1. Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat I mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa**. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat sebagai berikut :

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa**

Gambar 7. Visi Inspektorat I Badan POM

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat I Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

A2. Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih

terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat I Badan POM adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat I Badan POM. Inspektorat I menetapkan misi sebagai berikut :

- 1 **Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat**
- 2 **Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan**
- 3 **Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Gambar 8. Misi Inspektorat I Badan POM

Inspektorat I sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di lingkungan Badan POM akan tumbuh budaya transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat I secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi serta meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

A3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat I Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima

tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat I Badan POM adalah sebagai berikut :



Gambar 9. Tujuan dan Indikator Tujuan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat I melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat I memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

A4. Sasaran

Sasaran Inspektorat I merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran pencapaian sasaran menggunakan indikator-indikator dengan kriteria ukuran keberhasilan yang baik yakni **Specific** (tidak berdwimakna), **Measureable** (dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya), **Achievable** (dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (*controllable*), **Relevance** (terkait langsung dengan (merekpresentasikan) apa yang akan diukur), **Timebound** (mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu, dan **Cukup** (dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program).

Inspektorat Utama BPOM pada periode transisi pengembangan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari level Eselon II menjadi Eselon I dibagi

menjadi 3 periode yaitu bulan Januari – Februari 2018 merupakan SOTK lama dengan DIPA Inspektorat BPOM; bulan Maret – Juli 2018 merupakan SOTK baru namun masih menggunakan DIPA Inspektorat BPOM dan bulan Agustus – Desember 2018 merupakan SOTK baru yang telah menggunakan DIPA Inspektorat Utama BPOM. Indikator sasaran dan definisi operasional indikator sebagaimana tersaji dibawah ini :

Tabel 1. Definisi Operasional Indikator Januari – Februari 2018 (SOTK lama)

No.	Sasaran /Indikator	Definisi Operasional Indikator
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1. Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebasdari Kesalahan Material
		2. Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja
2.	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB
3.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"
4.	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	1. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan
		2. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu
		3. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"
5.	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM

No.	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	Dihitung dari tindak lanjut atas hasil pemeriksaan internal
6.	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	1. Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	Indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi dibandingkan dengan jumlah indikator pada level 3 (dari 93 indikator level 3), dengan level 2 sebagai <i>baseline</i>
7.	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	1. Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	Jumlah ASN Inspektorat yang memiliki kinerja dengan kriteria baik dibandingkan dengan seluruh ASN Inspektorat
		2. Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan
8.	Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Mempertahankan ISO 9001:2008
9.	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai AKIP Inspektorat	Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat

Tabel 2. Definisi Operasional Indikator Maret-Juli dan Agustus-Desember 2018 (SOTK baru)

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
1.	<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Perentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti adalah rasio jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang diberikan.
		Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator																								
2	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	<p>Program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah</p> <p>Untuk mengukur pencapaian Program Penguatan Pengawasan digunakan indikator-indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penanganan Gratifikasi. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penanganan Pengaduan Masyarakat. Penanganan Whistle Blowing System. Penanganan Benturan Kepentingan. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). <i>Fraud Control Plan</i> <p>Nilai RB BPOM program penguatan pengawasan dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN terdiri dari 2 (dua) penilaian yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan Nilai Pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM program pemerintahan yang bersih dan bebas KKN <p>Dihitung dari : (jumlah realisasi rencana aksi/jumlah rencana aksi) x 100%</p>																								
		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	Keandalan SPIP mitra kerja Inspektorat I dinilai dengan melaksanakan verifikasi terhadap pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM EPITE)	Evaluasi pengendalian intern dilaksanakan dengan cara melakukan penilaian terhadap penerapan unsur-unsur pengendalian intern secara umum pada tingkat unit kerja																							
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama		Dihitung dari jumlah Laporan Hasil Pengawasan Intern pada mitra kerja Inspektorat Utama																							
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material		Opini atas Laporan Keuangan Badan POM akan memenuhi salah satu opini BPK RI yang terdiri dari:																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM</th> <th>Persentase Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTP</td> <td>:</td> <td>WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>WTP DPP</td> <td>:</td> <td>Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>WDP</td> <td>:</td> <td>Wajar Dengan Pengecualian</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>TMP</td> <td>:</td> <td>Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Wajar</td> <td>:</td> <td><i>Adversed Opinion</i></td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM			Persentase Capaian	WTP	:	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%	WTP DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%	WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian	95%	TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%	Tidak Wajar	:	<i>Adversed Opinion</i>	50%
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM			Persentase Capaian																									
WTP	:	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%																									
WTP DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%																									
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian	95%																									
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%																									
Tidak Wajar	:	<i>Adversed Opinion</i>	50%																									

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator												
			<p>Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM</p> <p>Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan memperoleh status 'CLOSE' (Status 1 dan Status 4) / Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan) x 100%</p> <p>Status Tindak Lanjut yang diberikan BPK RI:</p> <table border="1"> <tr> <td>Status 1</td> <td>:</td> <td>Tindak lanjut telah Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 2</td> <td>:</td> <td>Tindak lanjut Belum Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 3</td> <td>:</td> <td>Belum Tindak lanjut</td> </tr> <tr> <td>Status 4</td> <td>:</td> <td>Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah</td> </tr> </table>	Status 1	:	Tindak lanjut telah Sesuai Saran	Status 2	:	Tindak lanjut Belum Sesuai Saran	Status 3	:	Belum Tindak lanjut	Status 4	:	Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah
Status 1	:	Tindak lanjut telah Sesuai Saran													
Status 2	:	Tindak lanjut Belum Sesuai Saran													
Status 3	:	Belum Tindak lanjut													
Status 4	:	Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah													
			<p>Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti</p> <p>Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi pengawasan intern) x 100%</p>												
3	<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	<p>Nilai AKIP Inspektorat I</p> <p>Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I</p>												

A5. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Inspektorat I Badan POM telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kebijakan Badan POM yaitu “Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien” sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kegiatan pengawasan internal di lingkungan Badan POM;
- b. Implementasi program reformasi birokrasi di seluruh unit kerja Badan POM;
- c. Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Badan POM.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut maka Inspektorat I Badan POM menyusun strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus bagi Inspektorat I yaitu:

1. Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/*stakeholders* terhadap peranan Inspektorat I dalam pengawasan;
2. Bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan;
3. Melibatkan peran aktif manajemen dalam Implementasi SPIP dan Pemberdayaan satgas SPIP dan satgas Laoran Keuangan sebagai bagian dari *three lines of defense*;
4. Melibatkan auditor dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan;
5. Maksimalisasi pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah;
6. Melaksanakan prioritas pengawasan dengan berdasarkan pada *risk based audit*;
7. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
8. Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk mengembangkan mekanisme pengawasan *by report, by system* dan *by audit*; dan
9. Meningkatkan kompetensi para auditor melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan berkesinambungan.

A6. Program

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program teknis dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

A.6.1 Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

A.6.2 Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM.

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat I Badan POM dirangkum dalam Program yaitu :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

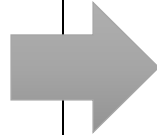

Program diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat I yang telah ditetapkan sebelumnya.

KEPALA BPOM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2019	
↓	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi 	<ol style="list-style-type: none"> Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 				BPOM

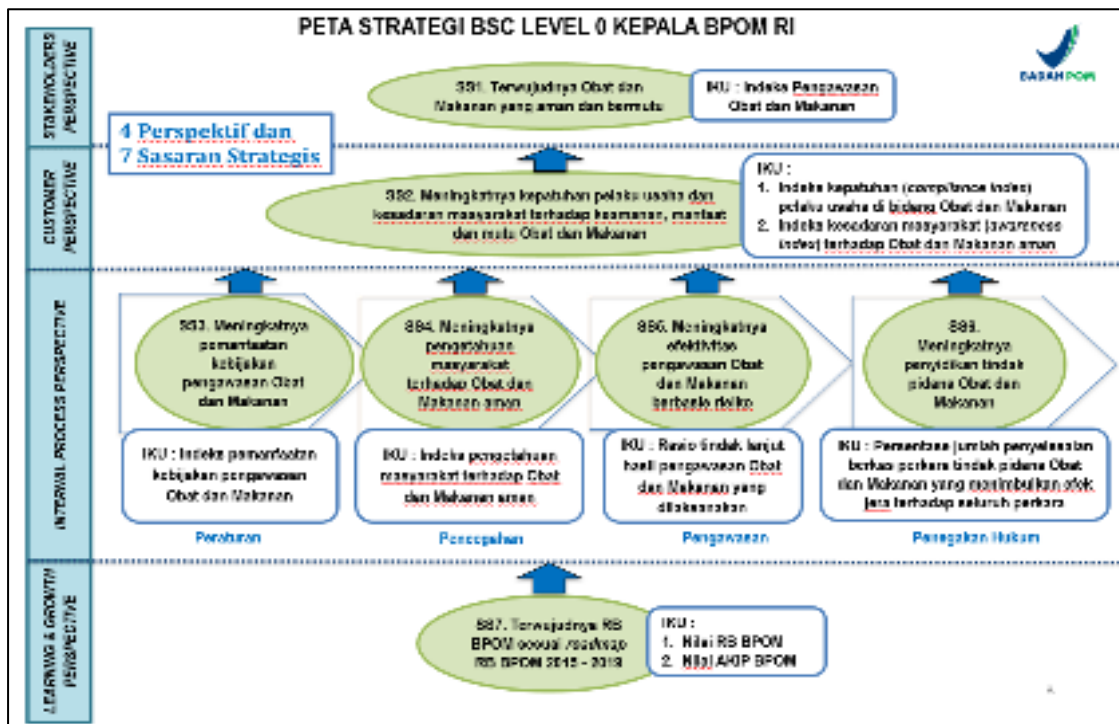
SEKTAMA	PROGRAM	SASARAN HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2019	
↓	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	<ol style="list-style-type: none"> Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN 			SEKTAMA

KEGIATAN	SASARAN KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2015	2019	

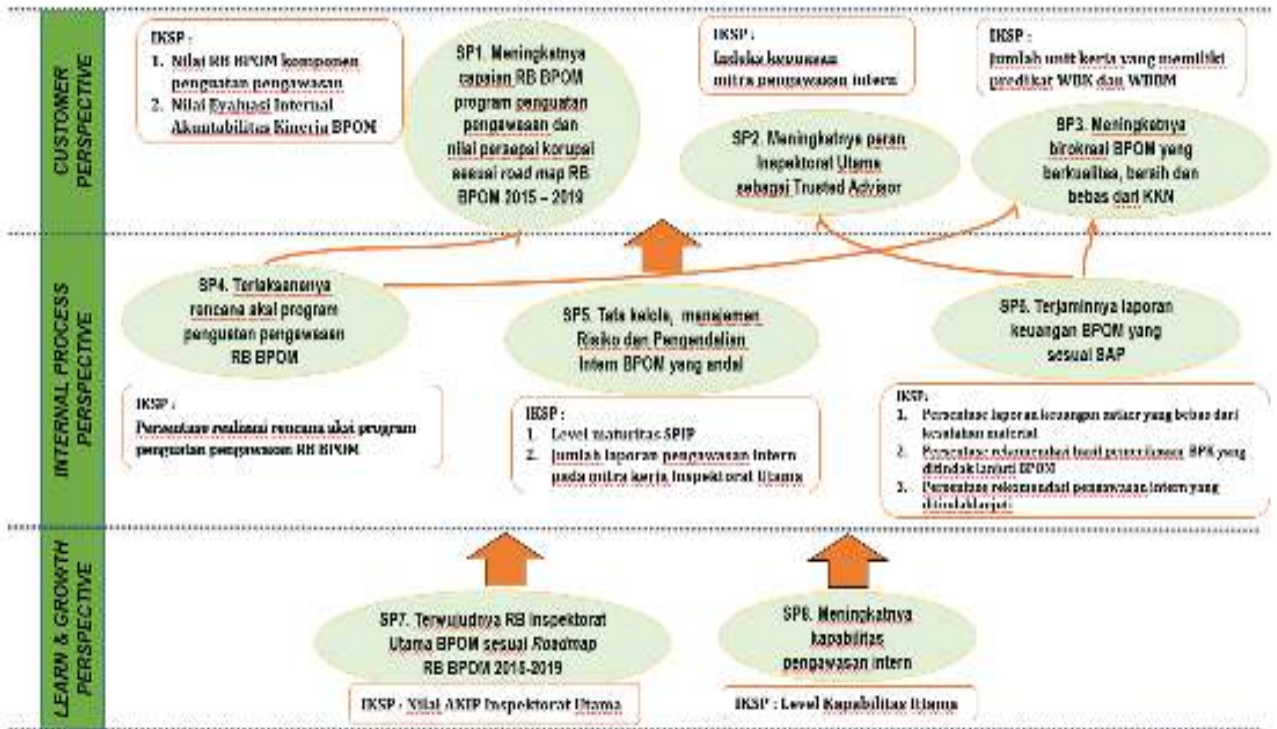
INSP

KEGIATAN	SASARAN KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	TARGET	UNIT ORGANISASI
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan 2. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu 3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM 4. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian interm tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK" 5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat 		INSPEKTORAT 

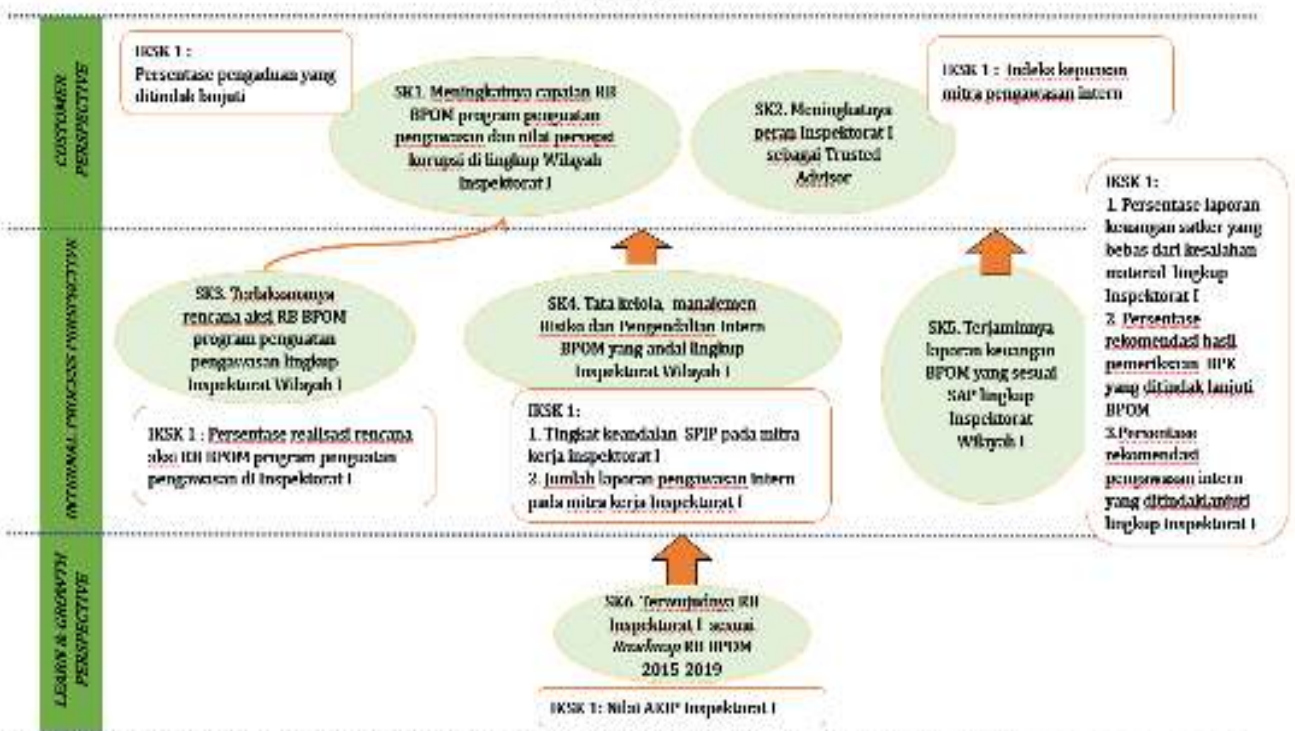
Gambar 10. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Jan- Feb 2018 (SOTK baru)



PETA STRATEGI BSC LEVEL 1
INSPEKTORAT UTAMA



PETA STRATEGI BSC LEVEL 2
INSPEKTORAT I



Gambar 11. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Mar-Jul & Agust-Des 2018 (SOTK baru)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Utama BPOM dalam periode transisi pengembangan organisasi dari level Eselon II menjadi Eselon I dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni :

- a. Perjanjian Kinerja sebagai Inspektorat BPOM (Januari - Februari 2018)

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan POM (Januari – Februari 2018)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%
		Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	73
2	Meningkatnya Efektivitas Organisasi, Tata Laksana, dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	75%
3	Meningkatnya Kepuasan Pemangku Kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%
4	Meningkatkan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10.5
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	90%
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kinerja "BAIK"	80%
5	Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak-lanjuti BPOM	84%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	76%
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%
7	Meningkatkan Pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34
8	Implementasi QMS	Perolehan Sertifikasi ISO 9001	100%
9	Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai AKIP Inspektorat	81

- b. Perjanjian Kinerja sebagai Inspektorat I BPOM (Maret - Juli 2018)

Dokumen ini merupakan transisi berupa Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan dengan organisasi dan tata kerja yang paling mutakhir, akan tetapi

masih menggunakan anggaran DIPA Inspektorat BPOM sebagaimana yang digunakan pada Perjanjian Kinerja bulan Januari s - d Februari 2018.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Badan POM (Maret – Juli 2018)

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%
		Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
2	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%
		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	84%
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	75%
			Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%
3	<i>Learn & Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	78

c. Perjanjian Kinerja sebagai Inspektorat I BPOM (Agustus - Desember 2018)

Setelah DIPA Inspektorat Utama Badan POM Tahun 2018 disahkan, Inspektorat I Badan POM menyusun kembali Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2018 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2018 yang telah disahkan.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Badan POM (Agustus – Desember 2018)

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70 %
		Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
2	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%
		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	84%
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	75%
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%			
3	<i>Learn & Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	78

Perubahan struktur organisasi dengan penguatan Inspektorat Badan POM yang dipimpin oleh Eselon II, menjadi Inspektorat Utama Badan POM yang dipimpin oleh Eselon I dengan membawahi Inspektorat I dan Inspektorat II, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdampak pada adanya masa peralihan pemisahan anggaran dari yang sebelumnya tergabung dalam satu anggaran Inspektorat Badan POM, menjadi terpisah antara anggaran Inspektorat I dan Inspektorat II.

Anggaran Inspektorat Badan POM tahun 2018 sebelum perubahan SOTK sebesar Rp7.152.902.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Anggaran Inspektorat Badan POM Tahun 2018 Sebelum Perubahan SOTK

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	84.715.000
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	407.859.000
3	Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM Program penguatan system pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	447.344.000
4	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	1.009.096.000
5	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	71.939.000
6	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	5.131.949.000
Total Anggaran		7.152.902.000

Sedangkan setelah perubahan SOTK, Inspektorat I mendapat alokasi anggaran dalam bentuk kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur I sebesar Rp8.101.668.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Anggaran Inspektorat I Badan POM Tahun 2018 Setelah Perubahan SOTK

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	82.897.000
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	497.590.000
3	Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM Program penguatan system pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	820.708.000
4	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	1.332.452.000
5	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	1.002.672.000
6	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	4.365.349.000
Total Anggaran		8.101.668.000

C. CARA MENGHITUNG CAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Gambar 12. Rumus Perhitungan Persentase Capaian

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja:

Kurang	$\chi < 75\%$
Cukup	$\chi < 75\% \leq \chi < 100\%$
Baik	100%
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

Gambar 13. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Gambar 14. Rumus Perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Standar Efisiensi (SE)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengamankan Inspektorat Utama dengan 2 (dua) unit Eselon II di bawahnya Inspektorat Utama yakni Inspektorat I dan II serta diferensiasi yang utama pada wilayah pengawasan.

Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Utama BPOM dalam periode transisi pengembangan organisasi dari level Eselon II menjadi Eselon I dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni :



Gambar 15. Periode Perjanjian Kinerja Inspektorat I pada Tahun 2018

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, Inspektorat I memiliki 6 (enam) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

tersebut. Pencapaian kinerja Inspektorat I selama tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>						
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%	85.71%	122.44	Memuaskan
2	Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai <i>Trusted Advisor</i>	2. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	76.27	93.01	Cukup
<i>Internal Process Perspective</i>						
3	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	3. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	90%	100.00	Baik
4	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	4. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	84%	92.5%	110.12	Memuaskan
		5. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21	21	100.00	Baik
5	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	6. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100.00	Baik
		7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	75%	73.45%	97.9	Cukup
		8. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	92%	108.23	Memuaskan
<i>Learning and Growth Perspective</i>						
6	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	9. Nilai AKIP Inspektorat I	78	75.31	96.55	Cukup

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2018 dari 9 (sembilan) indikator sasaran strategis, 5 (lima) diantaranya mencapai target dan 4 (empat) indikator tidak mencapai target.

A2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Penjelasan mengenai masing-masing sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I

Dalam kerangka evaluasi Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP.

Sasaran Meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I diukur menggunakan indikator kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan.

Tabel 9. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-1

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2017 (%) (8) = (6)/(4)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%) (10) = (6)/(9)
				Target	Realisasi	% Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(9)	(10) = (6)/(9)	
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	N/A	N/A	70%	85.71%	122,44 (memuaskan)	N/A	80%	107.14

Tabel 3-2 di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja “**Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan**” tahun 2018 sebesar 122.44% atau masuk kategori memuaskan. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena merupakan indikator baru.

Pada tahun 2018, dalam status sebagai Inspektorat maupun Inspektorat I, sebanyak 14 pengaduan yang diterima seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan penelusuran. Dari 14 pengaduan tersebut, sebanyak 12 penelusuran telah selesai dilaksanakan dengan hasil 10 pengaduan terbukti dan 2 pengaduan tidak terbukti. Adapun 2 pengaduan lain masih dalam proses penelusuran hingga akhir Tahun Anggaran 2018. Terhadap 10 pengaduan yang terbukti, telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan muatan pengaduan, antara lain berupa pembinaan, pengenaan sanksi, hingga pada pembuatan prosedur baru.



Gambar 16. Hasil Penelusuran Pengaduan Tahun 2018

Capaian tahun 2018 ini telah berada di atas target pada Renstra, namun mengingat capaian pada sasaran ini sangat tergantung pada jumlah maupun urgensi pengaduan yang masuk serta faktor-faktor lainnya, maka perlu diperhatikan agar pencapaiannya pada akhir periode Renstra tetap sesuai target.

Analisis Faktor Keberhasilan, Kendala, dan Upaya yang Telah Dilakukan

Faktor keberhasilan untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Penatalaksanaan disposisi secara optimal pada pengaduan yang masuk, sehingga setiap pengaduan dapat segera ditindaklanjuti oleh auditor.
- Penganggaran yang memadai, terutama untuk dilakukannya penelusuran pengaduan di Balai Besar/Balai POM.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah adanya pengaduan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja lain, seperti Biro Umum dan SDM. Terhadap kendala tersebut, Inspektorat I melakukan koordinasi secara optimal dan terkendali sehingga data yang bersifat rahasia dapat dikelola bersama-sama dengan baik, sampai dengan hasil tindak lanjut.

2. Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai *Trusted Advisor*

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu menikmati posisi nyaman sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Serta pada akhir pemeriksaan, menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh pemimpin unit kerja.

Perspektif pengawasan intern masa lampau tersebut pada akhirnya menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor intern untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi stakeholders.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi cita-cita besar the *Institute of Internal Auditors* (IIA). Auditor intern masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Sesudah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance and consulting*, kini IIA di bawah pimpinan Richard Chambers mengambil visi yang lebih maju lagi yakni auditor intern sebagai *trusted advisor*.

Inspektorat I merupakan salah satu produk pengembangan organisasi BPOM sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengubah struktur Inspektorat pada level Eselon II menjadi Inspektorat Utama pada level Eselon I. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Inspektorat Utama membawahi 2 (dua) unit Eselon II yakni Inspektorat I dan Inspektorat II.

Pada saat posisi Inspektorat masih pada Level Eselon II, dilakukan pengukuran sasaran “**Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan**”

yang paralel dengan sasaran **“Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai *Trusted Advisor*”** pada Inspektorat I sebagai elemen Inspektorat Utama.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada struktur organisasi sebelumnya adalah ‘Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal “Baik”, yang merupakan kumulatif dari penilaian terdiri atas 12 aspek terkait kompetensi auditor, 3 aspek terkait etika dan perilaku, serta 2 aspek terkait rekomendasi audit. *Tools* yang sama tetap digunakan dalam pengukuran indikator kinerja dari sasaran ini yakni “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern” dengan target kinerja untuk tahun 2018 sebesar 82.

Tabel 10. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-2

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap realisasi 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(4)	(9)	(10) = (6)/(9)
Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	N/A	84,31	82	76,27	93,01	90,46	84	90,79

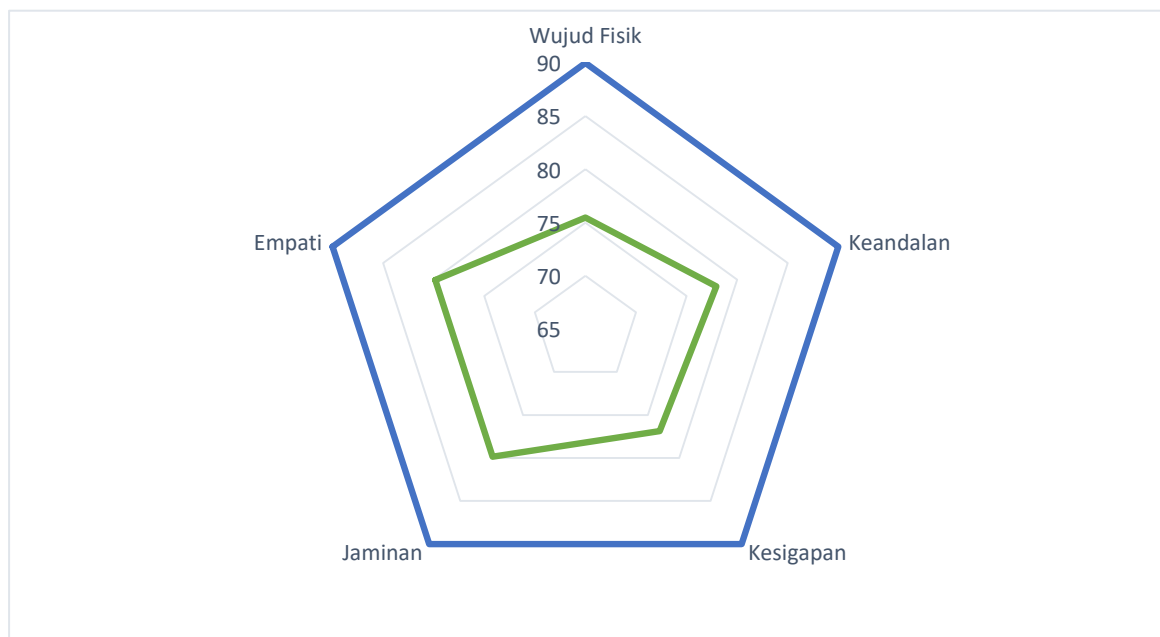
Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja **‘Indeks kepuasan mitra pengawasan intern’** tahun 2018 adalah 76,27, bila dibandingkan dengan target tahun 2018 maka capaian indikator adalah sebesar 93,01% dengan kategori Cukup. Realisasi indikator tahun 2018 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 adalah sebesar 90,46% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 90,79%. Namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena perbedaan tools survei.

Survei dilakukan berdasarkan 5 aspek yakni wujud fisik (*tangible*), keandalan (*reliability*), kesigapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). *Tools* untuk survei pada tahun 2018 dikembangkan menjadi lebih komprehensif dibandingkan tahun sebelumnya dengan perubahan sebagai berikut:



Gambar 17. Perubahan Komponen Penilaian Survei

Demi menjaga independensi survei, pengelolaan survei kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama. Rincian Hasil Survei Kepuasan Mitra Inspektorat I Tahun 2018 dapat dilihat pada **lampiran 9** dengan gambaran sebagai berikut :



Gambar 18. Hasil Survei Kepuasan Mitra Inspektorat I Tahun 2018

Analisis Penyebab Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan

Hasil survei tersebut telah dilakukan analisis terhadap penurunan hasil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya berkorelasi dengan *tools* yang digunakan. Pada tahun 2018, alat ukur yang digunakan telah semakin komprehensif dengan pendekatan yang lebih memadai untuk mengukur peran *trusted advisor* yang dimaksud oleh IIA.

Adapun nilai yang paling rendah pada hasil survei 2018 adalah pada aspek wujud fisik (*tangible*) yang meliputi komponen penyajian dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) serta rumusan temuan dan penyebab temuan.

Kelemahan pada aspek ini terjadi antara lain karena faktor transisi dari Inspektorat menjadi Inspektorat Utama yang disertai dengan redistribusi tanggung jawab, salah satunya untuk penyampaian LHA kepada auditan. Hal ini telah diidentifikasi pada saat pelaksanaan audit internal ISO QMS 9001:2015 dan menjadi temuan audit yang perbaikannya dipantau dalam pelaksanaan manajemen mutu hingga pada tingkat Rapat Tinjauan Manajemen.

Terhadap hasil survei tersebut, Inspektorat I menyusun rencana aksi sebagai berikut :

- Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor
- Peningkatan layanan konsultasi/*helpdesk* yang akan difasilitasi dengan forum konsultasi, grup WhatsApp, dan pengembangan aplikasi untuk konsultasi.
- Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja agar suatu temuan pada satu Satker tidak menjadi temuan maupun masalah juga pada Satker lainnya.
- Peningkatan pengelolaan dan dokumentasi pelaporan yang disampaikan Satker sehingga tidak terjadi permintaan yang berulang.

3. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I

Secara rutin, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan

RB) menyelenggarakan kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan Reformasi Birokrasi baik pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Pemerintah, termasuk di dalamnya BPOM sebagai entitas yang mengelola APBN.

Siklus kegiatan diawali dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk periode tahun 2017 dan semester I tahun 2018, sebagai instrumen pengukuran kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri dengan prinsip *self-assessment* yang diselenggarakan oleh asesor BPOM terhadap 8 (delapan) area perubahan untuk kemudian isian tersebut dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB.



Gambar 19. Delapan Area Perubahan Yang Diselenggarakan Asesor BPOM

Inspektorat Utama menjadi penanggung jawab area perubahan penguatan pengawasan. Bidang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan BPOM. Sebagaimana dijelaskan pada sasaran strategis yang pertama, bidang penguatan pengawasan meliputi 7 hal yaitu: 1) Pengendalian Gratifikasi, 2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 3) Penelusuran Pengaduan Masyarakat, 4) *Whistleblowing system*, 5) Penanganan Benturan Kepentingan, 6)

Pembangunan Zona Integritas, dan 7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pada tahun 2017, indikator yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang penguatan pengawasan berada dalam sasaran 'Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien' dengan indikator kinerja 'Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan'.

Seiring dengan kebutuhan organisasi, indikator yang terkait dengan Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan penekanan pada realisasi terhadap rencana aksi RB BPOM. Indikator ini cenderung lebih berorientasi *outcome* dibandingkan indikator sebelumnya, karena salah satu aspek penting dalam evaluasi RB adalah rencana aksi yang dibuat sebagai tindak lanjut hasil evaluasi. Aksi yang dilakukan diharapkan memberikan dampak yang sistematis terhadap peningkatan implementasi RB di lingkungan BPOM terutama pada area penguatan sistem pengawasan.

Tabel 11. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-3

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap realisasi 2017 (%) (8) = (6)/(4)	Target Renstra 2019 (9)	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%) (10) = (6)/(9)
				Target	Realisasi	% Capaian (7) = (6)/(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(4)	(9)	(10) = (6)/(9)
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	69,68%	88,7%	90%	90%	100 % (Baik)	101,46	92%	97,83

Tabel 11 diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja **“Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan”** mencapai 100% atau sesuai target yang diperjanjikan, dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Rencana Aksi RB Program Penguatan Sistem Pengawasan

Hasil Yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi	
			Rencana	Realisasi
a. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.	Mempertahankan Opini WTP	Implementasi kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan Intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum	Pertemuan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan	Lokakarya efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme dengan pelaku usaha di Bandung dan Semarang
		Implementasi kebijakan untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan	Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan intern	Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan intern per triwulan
			Monitoring dan Evaluasi hasil pemeriksaan eksternal	Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan eksternal per semester.
	Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Pendampingan penyusunan laporan keuangan Satker	Reviu laporan keuangan	Reviu Laporan Keuangan BPOM Semester I tahun 2018 dan TW III tahun 2018.
		Bimtek pelaporan keuangan	Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) satker pusat pada bulan Desember 2018
		Peningkatan kompetensi auditor terkait pengelolaan anggaran	Pelatihan Bendahara	Pelatihan Bendahara yang diikuti oleh Auditor Inspektorat I Badan POM
b. Implementasi program anti KKN	Penanganan gratifikasi	Sosialisasi Gratifikasi	Sosialisasi anti gratifikasi	Sosialisasi anti gratifikasi melalui banner, kartu e-money dan flashdisk
		Pelaporan Gratifikasi	Monitoring dan Evaluasi pelaporan gratifikasi	Jumlah laporan penerimaan gratifikasi s.d triwulan IV tahun 2018 sebanyak 9 laporan dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp7.335.000,00.
	Pengaturan konflik kepentingan	Sosialisasi Benturan Kepentingan	Sosialisasi Benturan Kepentingan	-
c. Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja	Evaluasi pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE)	Evaluasi kepatuhan implementasi PM EPITE Unit Kerja dan BB/BPOM	Evaluasi kepatuhan implementasi PM EPITE Unit Kerja dan BB/BPOM pada bulan November 2018.

Analisis Faktor Keberhasilan dan Upaya yang Telah Dilakukan

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain :

- 1) Tindak lanjut terhadap Road Map RB Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015;
- 2) Perubahan mekanisme kerja, mind set dan culture set pegawai secara sistematis dan konsisten untuk menjadi lebih baik;
- 3) Peningkatan efektifitas proses manajemen internal organisasi melalui restrukturisasi organisasi dan tata kerja melalui integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan SPIP.

4. Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I

Revitalisasi peran APIP yang tidak lagi sekadar *watchdog*, melainkan mitra kerja untuk peran *assurance and consulting*, serta yang terkini sebagai *trusted advisor* menjadikan Inspektorat I perlu masuk ke 3 aspek sekaligus dalam pengelolaan organisasi, yakni *governance*, *risk management*, dan *internal control*.

Tata kelola organisasi yang baik dalam perspektif modern pada prinsipnya bisa dikerucutkan dalam penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik. Pada instansi pemerintah, pengendalian intern telah diamanatkan sejak 10 tahun silam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Rincian capaian untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap realisasi 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(4)	(9)	(10) = (6)/(9)
Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	90.85%	91.30%	84%	92.7%	110,36 (Memuaskan)	101.5	85	109,05
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	N/A	N/A	21	21	100 (Baik)	N/A	23	91.30

a. Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, instansi pemerintah diamanatkan untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai alat bantu dalam penerapan pengendalian intern, maka sejak beberapa tahun terakhir, Inspektorat mengembangkan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) yang merupakan instrumen untuk menilai tingkat keandalan SPIP tingkat entitas yang diadaptasi dari *best practice* pada beberapa instansi lain yang memiliki maturitas SPIP lebih tinggi seperti Kementerian Keuangan. Pada Kementerian Keuangan sendiri, pelaksanaan EPITE telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan EPITE melalui konsep penilaian mandiri atau *self-assessment*, merupakan konsep yang dikembangkan oleh Inspektorat BPOM Pada Tahun 2015 dan diimplementasi lebih luas oleh Inspektorat Utama BPOM sebagai unit Eselon I baru sesuai amanat Perpres Nomor 80 Tahun 2017. Pengembangan selanjutnya adalah PM-EPITE dalam jaringan berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis web untuk kemudahan pelaksanaan evaluasi pengendalian internal di lingkungan Badan POM. Dari hasil evaluasi terhadap PM-EPITE ini akan diperoleh kesimpulan mengenai keandalan pengendalian intern tingkat entitas, temuan, dan

rekomendasi untuk perbaikan dan selanjutnya dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yaitu tingkat keandalan rendah (nilai akhir 0% s.d. 50%), tingkat keandalan sedang (nilai akhir 51% s.d. 80%), dan tingkat keandalan tinggi (nilai akhir 81% s.d. 100%).

Tabel 14. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4 Indikator ke-1

Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap realisasi 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	90,85%	95,46%	84%	92,5%	110,12 (Memuaskan)	96,75	85	108,82

Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja yang diukur dari persentase hasil Penilaian Mandiri Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) tahun 2018 adalah 92,5%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun 2016 dan 2017 mengingat perbedaan rumusan indikator kinerja. Pada tahun 2017 indikator kinerjanya adalah 'Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"' dengan capaian 95,46%, sedangkan pada tahun 2018 persentase hasil PM-EPITE langsung diterima sebagai capaian tanpa harus melakukan pemeringkatan terlebih dahulu. Pelaksanaan PM-EPITE sendiri diselenggarakan sebagai bagian integral dari audit manajemen mutu ISO 9001:2015 yang telah terintegrasi dengan SPIP.

Realisasi kinerja sebesar 92,5% melampaui target yang ditetapkan yakni 84%, sehingga persentase capaiannya menjadi 110,12% atau berada dalam kategori Memuaskan, dengan rincian hasil PM-EPITE dapat dilihat pada **lampiran 10**.

Analisis Penyebab dan Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan

Walaupun capaian ini melampaui 100% namun setelah dilakukan evaluasi didapat hasil bahwa beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka capaian, yakni :

- a) Satuan tugas SPIP selaku personil melaksanakan *self assessment* belum dapat melaksanakan penilaian dengan independen dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh hampir seluruhnya dalam kategori tinggi.
- b) Verifikasi PM-EPITE dilaksanakan oleh auditor internal QMS yang juga merupakan bagian dari suatu unit kerja yang dapat peran regulernya juga merupakan pelaksana kegiatan sehari-hari pada unit tersebut sehingga belum cukup objektif dalam melaksanakan verifikasi.

Mengingat pentingnya implementasi SPIP pada penyelenggaraan kegiatan, maka Inspektorat I melakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

- Bekerjasama dengan Inspektorat II dalam hal pengumpulan hasil PM-EPITE, sehingga seluruh unit kerja mengirimkan hasil yang dimaksud.
- Melakukan verifikasi bersamaan dengan proses audit yang diselenggarakan pada unit kerja yang berada di lingkup wilayah Inspektorat I.

b. Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja

Indikator ini digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat I pada bidang pengawasan intern melalui perhitungan jumlah Laporan Hasil Pengawasan Intern pada mitra kerja Inspektorat I sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan yang meliputi Audit Operasional, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Evaluasi SAKIP, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA-K/L, Reviu atas Pelaksanaan Realisasi Anggaran, serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan didefinisikan sebagai "Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu".

Tabel 15. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4 Indikator ke-2

Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap realisasi 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	18	19	21	21	100 (Baik)	110,52	23	91.30

Pada tahun 2018, Inspektorat I menyelesaikan 21 laporan atau bila dibandingkan dengan target tahun berjalan, capaian indikator sebesar 100% (kategori Memuaskan).

Sebanyak 21 laporan pengawasan intern pada mitra kerja terdiri dari :

a) Kegiatan Audit

Kegiatan audit yang dilakukan oleh Inspektorat I meliputi audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu pada unit kerja yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Inspektorat I sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017.

Audit operasional terdiri dari 15 (lima belas) laporan yang terbagi dalam 2 jenis realisasi yakni pelaksanaan sebelum perubahan struktur organisasi dan setelah perubahan struktur organisasi.

Dengan menggunakan DIPA Inspektorat, telah diselenggarakan 6 kegiatan audit operasional masing-masing pada Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai POM di Kupang, Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai Besar POM di Palembang, Balai POM di Gorontalo, dan Balai Besar POM di Surabaya dengan masing-masing menghasilkan 1 laporan.

Sedangkan, dengan menggunakan DIPA Inspektorat Utama, secara spesifik anggaran Inspektorat I dilakukan 8 (delapan) kegiatan audit operasional pada Balai Besar POM di Makassar, Balai Besar POM di Mataram, Balai POM di Palu, Balai POM di Manokwari, Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Samarinda, Balai Besar POM di Palangka Raya, dan Balai Besar POM di Jakarta.

Audit Tujuan Tertentu (ATT) diselenggarakan pada wilayah-wilayah yang menjadi subyek pengawasan Inspektorat I dengan hasil 1 laporan.

b) Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat I meliputi :

- 1) Reviu atas Laporan Keuangan BPOM TA 2017 pada bulan Februari 2018, Reviu Laporan Keuangan BPOM Semester I Tahun 2018, dan Reviu Laporan Keuangan BPOM Triwulan III Tahun 2018 dengan *output* berupa Laporan Hasil Reviu.
- 2) Reviu RKA-K/L TA 2019 telah diselenggarakan oleh APIP bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli dan November 2018 serta diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen dan Petugas Perencana dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPOM yang bertanggungjawab dalam menyusun RKA-K/L Satker.
- 3) Reviu atas Pelaksanaan Realisasi Anggaran, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA) serta Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, APIP sebagai *early warning* dan *quality assurance* diminta untuk melakukan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa secara berkala setiap tiga bulan (triwulan). Tahun Anggaran 2018 dilakukan reviu kualitas belanja untuk mengidentifikasi kualitas belanja dari masing-masing K/L. Reviu kualitas belanja ditujukan untuk menilai kesesuaian alokasi, efisiensi dan efektifitas, ketepatan waktu, transparansi dan akuntabilitas belanja.

c) Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Merupakan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, Inspektorat I menjadi koordinator dalam pelaksanaan survei yang dimulai dari identifikasi pertanyaan sesuai peraturan, pengumpulan populasi pelanggan dari Unit Pelayanan Publik, pengembangan kuesioner berikut *tools* untuk perhitungannya dalam bentuk *spreadsheet*, hingga koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi BPOM dalam pengembangan survei berbasis dalam jaringan (daring) untuk layanan yang sudah dilakukan sepenuhnya secara daring. Hasil SKM dikenal sebagai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaporkan baik pada level unit kerja hingga level Badan POM dengan rincian IKM sebagaimana **lampiran 11**.

d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Segala bentuk rekomendasi hasil pengawasan baik dari eksternal (BPK RI dan BPKP) maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah dalam rangka meningkatkan kinerja BPOM. Oleh karena itu, bagi Inspektorat Utama pada umumnya dan Inspektorat I pada khususnya, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan intern setiap triwulan dan hasil pengawasan ekstern setiap semester sangatlah penting.

e) Laporan Evaluasi SAKIP.

Inspektorat Utama diamanatkan untuk menyelenggarakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sedangkan evaluasi pada tingkat instansi ini diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB. Inspektorat I menyelenggarakan evaluasi SAKIP pada unit kerja yang menjadi wilayah pengawasannya dengan hasil 1 (satu) laporan dan rincian sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Analisis Faktor Keberhasilan, Kendala, dan Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor Keberhasilan sasaran ini antara lain:

- Pelaksanaan audit berdasarkan perencanaan yang telah dituangkan dalam Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- Penganggaran yang memadai dan didukung oleh proses reviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada

- Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti :

- Perubahan organisasi yang berdampak pada 3 periode Perjanjian Kinerja (PK) menyebabkan penyelenggaraan kegiatan membutuhkan penyesuaian waktu pelaksanaan karena menunggu selesainya proses perubahan/ revisi anggaran sesuai struktur organisasi baru.
- Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan eksekusi pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni :

- Sinkronisasi PKPT dengan progres transisi DIPA sehingga audit tetap terlaksana baik pada anggaran sebelum perubahan maupun setelah perubahan struktur organisasi.
- Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data revidi, evaluasi SAKIP, pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, hingga penyelenggaraan SKM dapat dilaksanakan dengan baik.

5. Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di lingkup wilayah Inspektorat I

Badan POM merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seprangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tertanggal 22 Oktober 2010 yang termuat dalam Lampiran I.02, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengatur mengenai penyajian laporan

keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* mengambil peran dalam terwujudnya laporan keuangan Badan POM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja secara khusus, melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material yang akan dinilai dari hasil pemeriksaan BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Tabel 16. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2017 (%) (8) = (5)/(3)	Target Renstra 2019 (9)	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%) (10) = (5)/(8)
				Target	Realisasi	% Capaian (7) = (5)/(4)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)	(8) = (5)/(3)	(9)	(10) = (5)/(8)
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	100,00 (Baik)	100,00	100%	100,00
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	72,60%	82,82%	75%	73,45%	97,93 (Cukup)	88,69	78%	94,17
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	88,99%	73,96%	85%	92,00%	108,23 (Memuaskan)	124,39	87%	105,75

a. Persentase Laporan Keuangan Satker yang Bebas dari Kesalahan Material

Sebelum perubahan SOTK, laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material berada dalam sasaran “Meningkatnya akuntabilitas BPOM” dengan indikator kinerja “Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material”. Parameter yang digunakan adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100%.

Tabel 17. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-1

Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap realisasi 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(3)	(7) = (4)/(2)	(8)	(9) = (4)/(7)
Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	100.00 (Baik)	100.00	100%	100.00

Capaian indikator kinerja “Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material” tahun 2016 – 2018 sebesar 100%, dengan kategori Baik. Sesuai definisi operasional, capaian 100% berkorelasi dengan opini WTP yang diberikan oleh BPK RI pada Laporan Keuangan Badan POM TA 2017 yang diperiksa pada tahun 2018.

Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.



Gambar 20. Ilustrasi Pencapaian Opini WTP dari BPK RI Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM

Analisis Faktor Keberhasilan dan Upaya yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian target indikator pada tahun 2018 ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- 1) Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama pada umumnya dan Inspektorat I pada khususnya, baik untuk Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini.
- 2) Pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan BPOM berupa pendampingan dan pembinaan kepada BB/BBPOM dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- 3) Penguatan peran *consulting* oleh APIP terutama pada pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja.

Pencapaian indikator kinerja ini perlu terus dipertahankan dengan cara berkoordinasi secara simultan dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu sehingga kredibilitas Badan POM dapat dipertahankan.

b. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti BPOM

Indikator yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI ini merupakan salah satu indikator yang tidak berubah seiring perubahan struktur organisasi BPOM. Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas merupakan hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Persentase ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti sesuai saran oleh BPOM, dan tidak dapat ditindaklanjuti yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Persentase ini berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester yang dibuat oleh BPK RI.

Tabel 18. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-2

Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2017 (%) (7) = (5)/(3)	Target Renstra 2019 (8)	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%) (9) = (5)/(8)
			Target (4)	Realisasi (5)	% Capaian (6) = (5)/(4)			
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	72,60%	82.82%	75%	73.45%	97,93 (Cukup)	88.69	78	94.17

Indikator kinerja “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” memiliki realisasi sebesar 73,45%, yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK pada Semester I TA 2018 bersamaan dengan penyerahan opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BPOM TA 2017. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II TA 2018 sampai dengan awal tahun 2019 belum tersedia mengingat BPK RI baru mengakhiri agenda pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada akhir Desember 2018. Pembaharuan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti pada semester II tahun 2018 akan diserahkan kepada

Badan POM selaku entitas yang diperiksa pada saat penyerahan Laporan Keuangan *Unaudited* TA 2018 (Februari 2018).

Bila dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian indikator ini adalah 97,93% (kategori Cukup). Realisasi indikator tahun 2018 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 secara persentase mengalami penurunan, mengingat capaian pada tahun 2017 mencapai 82,82% sehingga capaian tahun 2018 adalah 88,69% dari tahun 2017.

Analisis Penyebab Kegagalan, Kendala, dan Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan

Permasalahan yang menyebabkan pencapaian target berada pada level cukup karena Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2018 oleh BPK RI yang berisi tindak lanjut Badan POM pada semester II tahun 2018 belum terbit sampai dengan awal tahun 2019, sehingga capaian kinerja berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan tindak lanjut semester I tahun 2018.

Pada tahun 2018, Inspektorat I telah melakukan konsolidasi internal sebagai bahan evaluasi. Salah satu poin pentingnya adalah peningkatan persentase pemenuhan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK melalui beberapa metode sebagai berikut:

- 1) Koordinasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ke Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Medan, dan Balai Besar POM di Serang. Koordinasi dilakukan langsung ke Satker terkait sesuai dengan temuan spesifik pada satuan kerja tersebut, antara lain BMN yang hilang dan status tanah tempat berdirinya gedung dan bangunan yang menjadi aset Badan POM.
- 2) Pertemuan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Hotel JS Luwansa yang melibatkan Satker dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sesuai saran dan tim Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK. Inspektorat I mengkoordinir pertemuan ini guna menjamin kesepahaman antara BPK dan Satker penanggung jawab pelaksana rekomendasi sehingga tindak lanjut yang dilakukan telah benar-benar sesuai dengan saran.

3) Lokakarya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui Sinergisme dengan Pelaku Usaha di Bandung dan Surabaya sebagai bagian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK.

Tahun 2017 perhatian difokuskan pada kerjasama lintas sektor melalui pelaksanaan sarasehan maupun lokakarya pengawasan obat dan makanan di Denpasar, Batam, dan Manado, sedangkan pada tahun 2018 fokus pada pelaku usaha sebagai upaya menjamin kesinambungan pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja BPK pada pengawasan obat dan makanan oleh BPOM.

Pasca diselenggarakannya kegiatan-kegiatan tersebut, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK pada Semester 2 Tahun 2018 berlangsung dengan lebih *smooth* melalui adanya kesepahaman dari Satker terkait temuan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang belum diumumkan secara legal formal yaitu belum terbitnya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2018, persentase pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada BPOM telah meningkat menjadi level Memuaskan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Inspektorat I akan melaksanakan upaya-upaya yang telah dilakukan secara konsisten dan mempercepat pelaksanaannya pada semester I tahun berjalan.

c. Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti

Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan instansi pemerintah, sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional.

Inspektorat I sebagai unit yang mengelola pengawasan intern serta memiliki perangkat personalia auditor menyelenggarakan tugas pengawasan intern baik itu berupa audit, reviu, pemantauan, maupun evaluasi. Utamanya pada audit, *output* dari kegiatan audit adalah rekomendasi kepada unit kerja yang diaudit untuk melaksanakan

perbaikan guna tercapainya visi dan misi organisasi. Tindak lanjut maupun pemenuhan terhadap rekomendasi yang diberikan merupakan salah satu parameter yang bisa dikuantifikasikan dalam pekerjaan pengawasan intern pada perwujudan visi dan misi organisasi.

Tabel 19. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-3

Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2017 (%) (7) = (5)/(3)	Target Renstra 2019 (8)	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%) (9) = (5)/(8)
			Target	Realisasi	% Capaian (6) = (5)/(4)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	88,99%	73,96%	85%	92,00%	108,23 (Memuaskan)	124,39	87%	105,75

Realisasi indikator kinerja “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti” adalah sebesar 92%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 maka capaian indikator adalah sebesar 108,23% (kategori Memuaskan). Realisasi indikator tahun 2018 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 adalah sebesar 124,39% dan bila dibandingkan dengan Renstra tahun 2019 adalah 105,75%. Rekapitulasi monitoring rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Analisis Faktor Keberhasilan, dan Upaya yang Telah Dilakukan

Faktor Keberhasilan capaian yang dikategorikan memuaskan ini karena adanya upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit, paralel dengan yang dilakukan pada hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan.
- 2) Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reuiu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi

kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan.

- 3) Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan menjadi lebih adekuat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multi tafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini menyebabkan unit kerja lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi.

Untuk mempertahankan maupun meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat I akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Secara konsisten mengawal rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu
- 2) Melakukan integrasi data dengan aplikasi *database* data pengawasan yang bernama Simolekdesi Berkinerja. Konten aplikasi ini pada prinsipnya merupakan data-data pengawasan yang dimiliki oleh Badan POM dan khusus untuk audit, proses tindak lanjut dapat dilakukan melalui medium aplikasi tersebut, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan.

6. Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah “Nilai AKIP Inspektorat I” dengan target nilai 78. Nilai AKIP yang dimaksud adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja Inspektorat I. Penilaian terhadap Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dipandang dapat mewakili implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja sebagaimana dituangkan dalam peta jalan RB BPOM 2015-2019.

Tabel 20. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-6

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(4)	(9)	(10) = (6)/(9)
Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	72,06	74,73	78	75,31	96,55 (Cukup)	100,78	81	92,98

Tabel 20 diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja “Nilai AKIP Inspektorat I” tahun 2018 adalah sebesar 75,31 yang merupakan penilaian terhadap SAKIP Inspektorat sebelum pengembangan struktur organisasi ditambah dengan implementasi SAKIP sejak penyusunan laporan, hingga evaluasi atas rencana aksi pada periode struktur organisasi sebagai Inspektorat I dan Inspektorat II.

Bila dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian indikator adalah sebesar 96,55% (kategori Cukup). Realisasi indikator tahun 2018 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 adalah sebesar 100,78% atau telah terjadi kenaikan dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 92,98%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja, Kendala, dan Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan

Kenaikan nilai AKIP Inspektorat I tahun 2018 tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan capaian sebelumnya, namun demikian bila dibandingkan dengan target tahun 2018, realisasi target belum tercapai. Beberapa kendala yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah:

- a) Belum adanya pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date*, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Lemahnya rewiu internal terkait analisis capaian kinerja meliputi justifikasi/ penjelasan hambatan capaian target dan upaya perbaikan yang akan/ telah dilakukan.
- c) Masih rendahnya pemanfaatan evaluasi internal dalam meningkatkan kinerja.

Untuk dapat mencapai target pada indikator kinerja ini maka upaya yang perlu dilakukan yaitu menyusun mekanisme tentang pengumpulan data kinerja, melakukan rewiu internal terkait analisis capaian kinerja secara memadai dan berkala, serta mengoptimalkan pemanfaatan evaluasi internal untuk peningkatan kinerja.

Capaian masing-masing indikator kinerja Inspektorat I Badan POM pada tahun 2016, 2017 dan 2018 bila dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada Renstra tahun 2019 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 s.d. 2018 terhadap Target Renstra 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	2016		2017		2018	
				Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>									
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100
2	Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	2. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	N/A	N/A	84,31	102,81	76,27	93,01
<i>Internal Process Perspective</i>									
3	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	3. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%	69,68%	75,73	88,70%	96,41	90%	97,82
4	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	4. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	90%	90,85%	100,94	95,46%	106,06	92,5%	102,77
		5. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	18	78,26	19	82,60	21	91,30

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	2016		2017		2018	
				Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)
5	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	6. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100,00	100%	100	100%	100
		7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	80%	72,6%	90,75	82,82%	103,52	73,45%	91,81
		8. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	88,99%	104,69	73,96%	87,01	92%	108,23
Learning and Growth Perspective									
6	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	9. Nilai AKIP Inspektorat I	81	72,06	88,96	74,73	92,26	75,31	92,97

Perubahan organisasi dari Inspektorat menjadi Inspektorat Utama, menyebabkan capaian indikator nomor 1 dan 2 tidak bisa dibandingkan secara memadai serta diketahui bahwa terdapat 1 (satu) realisasi indikator yang telah mencapai target Renstra tahun 2019 yakni “Persentase laporan keuangan Satker yang bebas dari kesalahan material”.

Adapun capaian pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Pencapaian Inspektorat Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Stakeholder/Customer Perspective						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1. Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%	100%	100,00	Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
		2. Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	73	70.78	96.96	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	3. Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	75%	88.70%	118.27	Memuaskan
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	4. Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%	84.31%	120.44	Memuaskan
Internal Process Perspective						
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	5. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan ^{*)}	10,5	11.05	105.24	Memuaskan
		6. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu ^{*)}	90%	100%	111.11	Memuaskan
		7. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK" ^{*)}	80%	95.46%	119.32	Memuaskan
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	8. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	84%	82.82%	98.59	Cukup
		9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	76%	73.96%	97.32	Cukup
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	10. Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%	97.98%	244.95	Tidak dapat disimpulkan
Learning and Growth Perspective						
7	Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	11. Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100,00	Baik
		12. Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	34	100,00	Baik
8	Implementasi QMS	13. Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100,00	Baik
9	Meningkatkan Akuntabilitas	14. Nilai AKIP Inspektorat I	81	74,73	92.26	Cukup

Pada tahun 2018 dalam upaya optimalisasi organisasi dan tata kerja Inspektorat I BPOM, dilakukan reviu terhadap Renstra Inspektorat I yang telah dimiliki sebelumnya. Dari 9 (sembilan) indikator yang dimiliki, Inspektorat I memandang perlu untuk adanya penyesuaian pada 5 (lima) indikator dengan 1 (satu) diantaranya adalah perubahan rumusan indikator. Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya dipandang perlu mendapatkan penyesuaian target baik naik maupun turun.

Perubahan Indikator

Berdasarkan hasil reviu Renstra Inspektorat I, perlu diubah menjadi "Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja" dengan target 84% pada tahun 2018 dan 90% pada tahun 2019. Dengan tools yang digunakan adalah EPITE, sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan capaian kinerja untuk indikator tersebut.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan dan digunakan setidaknya-tidaknya sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Mengingat konsep maturitas organisasi membutuhkan penilaian dari eksternal (BPKP), maka kontrol terhadap capaian sepenuhnya ada pada pihak luar, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme pengukuran kontribusi dari Inspektorat I pada level maturitas SPIP BPOM yaitu melalui pengawasan pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasannya.

Tools EPITE yang memberikan gambaran tentang lingkungan pengendalian pada tingkat entitas, dan diverifikasi oleh Inspektorat I serta diberikan perlakuan khusus berupa pendampingan dan kegiatan lainnya juga meningkatkan nilai SPIP, sehingga secara langsung berkorelasi pada semakin matangnya penerapan SPIP di satker. Dan berdampak langsung pada peningkatan level maturitas SPIP di BPOM. Target 84% dan 90% diperoleh dari analisis komprehensif terhadap nilai penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh satker yang pada umumnya berada dalam kisaran 78% sampai 100%. Semakin tinggi angka persentase pemenuhan EPITE, semakin matang pula pengendalian intern pada entitas tersebut.

Penyesuaian Target

1. Pada tahun 2018, Inspektorat I menetapkan target indeks kepuasan mitra sebesar 82, namun nilai yang diperoleh adalah 76,27 dengan mekanisme pengumpulan dan pengolahan kuesioner oleh Bagian Tata Usaha.

Survei dilakukan berdasarkan 5 aspek yakni wujud fisik (*tangible*), keandalan (*reliability*), kesigapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Tools untuk survei pada tahun 2018 dikembangkan menjadi lebih komprehensif dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya terdiri dari 3 unsur yakni Kompetensi Auditor, Etika dan Perilaku, serta Rekomendasi Audit.

Pada tahun 2018, terdapat transformasi kelembagaan yang membutuhkan penyesuaian tata kerja dan penyesuaian alat ukur yang memerlukan pengujian memadai untuk memberi jaminan hasilnya mencerminkan kebutuhan mitra.

Mengingat target tahun sebelumnya belum tercapai, maka kenaikan target untuk tahun 2019 perlu disesuaikan, sekurang-kurangnya sama dengan tahun 2018.

2. Persentase target rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM disesuaikan dari 78% menjadi 80%. Peningkatan target ini merupakan jaminan bahwa Inspektorat I bisa bekerja optimal mengawal proses tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK.

Berdasarkan perhitungan internal terhadap tindak lanjut yang telah disampaikan kepada BPK namun belum ditetapkan statusnya, diketahui potensi pemenuhan tindak lanjut BPOM sebesar lebih dari 80% tertinggi diantara Kementerian/Lembaga lain yang berada di bawah pengawasan Auditorat Keuangan Negara VI BPK RI.

Potensi ini memberikan keyakinan untuk mencapai target pada 2019 sehingga target pada Renstra perlu ditingkatkan.

3. Salah satu pengawasan intern oleh APIP adalah audit keuangan maupun kinerja yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pada tahun 2018, capaian Inspektorat I secara khusus telah melebihi 90% dengan capaian Inspektorat Utama belum mencapai 87%.

Pada tahun 2019, Inspektorat I merencanakan untuk audit kinerja sesuai Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.01.1.22.08.18.4119 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan BPOM, serta audit operasional pada seluruh unit kerja objek pengawasan Inspektorat I sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017. Hal ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya sehingga belum diperoleh pola tindak lanjut rekomendasi yang optimal.

Dengan demikian, hasil reuiu untuk indikator ini adalah dengan tidak meningkatkan target, melainkan tetap sama dengan target tahun 2018.

4. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari marwah Reformasi Birokrasi yang selalu menjadi fokus dari jalannya pemerintahan. Pada tahun 2018, target yang ditetapkan adalah 78 atau kategori BB, sedangkan target pada 2019 adalah 81 atau kategori A.

Walaupun capaian tahun 2018 belum mencapai target, namun peningkatan target pada tahun 2019 merupakan tuntutan organisasi untuk memperoleh nilai SAKIP diatas kategori BB yang telah diperoleh selama 2 tahun terakhir.

Peningkatan level ini menjadi kewajiban seluruh unit kerja di BPOM dan akan dapat diakselerasi melalui implementasi SKP Online dan e-performance pada tahun 2019.

B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat I Badan POM selama tahun 2018 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Inspektorat I dilakukan secara lengkap dan rinci serta melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara Inspektorat Badan POM dengan KPPN setempat.

Anggaran Inspektorat I tahun 2018 dapat dibagi menjadi 2 periode yakni bulan Januari-Juli 2018 untuk DIPA Inspektorat yang penggunaannya diselenggarakan bersama-sama dengan Inspektorat II rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2018 (SOTK Lama)

No.	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	1	1	100%	84,715,000	84,714,431	99.999%
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	2	2	100%	407,580,000	407,686,502	100.026%
3	Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM program penguatan pengawasan di lingkup wilayah	9	9	100%	447,344,000	447,246,532	99.978%

No.	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Inspektorat I						
4	Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	10	10	100%	1,009,096,000	1,008,908,119	99.981%
5	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM yang sesuai SAP	2	2	100%	71,943,000	71,941,100	99.997%
6	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	43	43	100%	5,132,224,000	5,088,574,244	99.149%
Jumlah total		67	67	100%	7,152,902,000	7,109,070,928	99.387%

Sejalan dengan Perjanjian Kinerja periode Agustus s/d Desember 2018, anggaran Inspektorat I menggunakan DIPA yang telah dibagi *output*-nya antara Inspektorat I dan Inspektorat II. Rincian realisasi anggaran Inspektorat I adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2018 (SOTK Baru)

No.	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	8	8	100%	82,897,000	81,637,200	98.48%
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	18	18	100%	497,590,000	487,028,660	97.88%
3	Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM program penguatan pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	2	2	100%	783,008,000	622,065,425	79.45%
4	Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	18	18	100%	1,041,897,000	1,022,945,710	98.18%
5	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM yang sesuai SAP	19	19	100%	1,290,847,000	1,159,669,538	89.84%
6	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	58	58	100%	4,405,429,000	4,130,748,361	93.76%
Jumlah total		123	123	100%	8,101,668,000	7,504,094,894	92.62%

C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan pengukuran

efisiensi kegiatan Inspektorat I, sebagaimana dapat dilihat pada **lampiran 8** diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 25. Efisiensi Kegiatan Inspektorat I Tahun 2018

Kategori Efisiensi	Jumlah Kegiatan
Ekstrem Efisien (TE > 0,5)	2
Efisien (TE ≥ 0,5)	18
Tidak Terealisasi	0
TOTAL	20

- a. Terdapat beberapa kegiatan yang memiliki tingkat efisiensi lebih dari 0,5 yakni:
- Rapat Evaluasi dan Perencanaan Strategi Inspektorat Utama (TE = 0,59)
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan (TE = 2.47)

Tingkat efisiensi yang tinggi ini terjadi pada kegiatan yang berhubungan dengan revisi DIPA terkait pemisahan anggaran Inspektorat menjadi Inspektorat I dan Inspektorat II pada pertengahan tahun.

- b. Sebanyak 18 kegiatan yang telah terealisasi dinyatakan efisien.

Adapun 2 kegiatan dengan TE di atas 0,5 tersebut tidak mempengaruhi efisiensi per sasaran. Rincian efisiensi sebagai tabel berikut:

Tabel 26. Efisiensi Per Sasaran terhadap Anggaran

No.	Sasaran	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		% Input	% Output				
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	98.48%	100%	1.02	1.00	0.02	Efisien
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	97.86%	100%	1.02	1.00	0.02	Efisien
3	Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM program penguatan pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	79.05%	100%	1.27	1.00	0.27	Efisien
4	Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	96.32%	100%	1.04	1.00	0.04	Efisien
5	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM yang sesuai SAP	88.94%	100%	1.12	1.00	0.12	Efisien
6	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	93.97%	100%	1.06	1.00	0.06	Efisien

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2018 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 (SOTK Baru). Pada tahun 2018 yang merupakan tahun keempat dari RPJM tahap tiga (2015-2019), terdapat beberapa keberhasilan antara lain mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2017 dan resertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2015.

Inspektorat I Badan POM secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja 2018 dapat dicapai. Namun demikian, masih terdapat pencapaian 4 (empat) sasaran yang belum optimal yaitu:

1) Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor, dengan indikator “Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern”

Kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah faktor transisi dari Inspektorat menjadi Inspektorat Utama yang disertai dengan redistribusi tanggung jawab, salah satunya untuk penyampaian LHA kepada auditan.

2) Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I, dengan indikator “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM”.

Kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah Laporan Hasil pemantauan tindak lanjut semester II tahun 2018 oleh BPK RI yang berisi tidak lanjut yang telah dilakukan Badan POM pada semester II tahun 2018 belum terbit sampai dengan awal tahun 2019. Sehingga capaian kinerja berdasarkan Laporan Hasil pemantauan tindak lanjut semester I tahun 2018.

3) Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019, dengan indikator “Nilai AKIP Inspektorat I”

Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah:

- a. Belum adanya pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date*, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Lemahnya reviu internal terkait analisis capaian kinerja meliputi justifikasi/ penjelasan hambatan capaian target dan upaya perbaikan yang akan/ telah dilakukan.
- c. Masih rendahnya pemanfaatan evaluasi internal dalam meningkatkan kinerja.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2018, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- a. Menyusun rencana aksi dalam rangka peningkatan indeks Kepuasan mitra pengawasan intern dan melaksanakannya secara optimal serta melakukan pemantauan berkesinambungan terhadap kemajuan pelaksanaannya.
- b. Melakukan percepatan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI melalui rekonsiliasi bersama Satker/ unit kerja terkait dan tim monev BPK
- c. Menyusun mekanisme tentang pengumpulan data kinerja, melakukan reviu internal terkait analisis capaian kinerja secara memadai dan berkala, serta mengoptimalkan pemanfaatan evaluasi internal untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

Lampiran 1

REVIU RENSTRA INSPEKTORAT I BADAN POM

Perspektif	Sasaran	Indikator	Target Kinerja dan Sasaran (Renstra Lama)					Indikator	Target Kinerja dan Sasaran (Reviu Renstra)				
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 - 2019	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	-	-	-	70%	80%	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	-	-	-	70%	80%
	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	-	-	82	84	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	-	-	82	82
<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	-	-	-	90%	92%	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	-	-	-	90%	92%
	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	Level Maturitas SPIP	-	-	-	Level 3	Level 3	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	-	-	-	84%	90%
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	-	-	-	21	23	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	-	-	-	21	23
	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	-	-	-	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	-	-	-	100%	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	-	-	-	75%	78%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	-	-	-	75%	80%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	-	-	-	85%	87%	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	-	-	-	85%	85%	
<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	-	-	-	75	75.26	Nilai AKIP Inspektorat I	-	-	-	78	81



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : B-HK.04.03.7.03.18. 0149**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2018-2019**

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Utama tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018-2019.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama menjadi landasan dalam melaksanakan peran pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk masa tahun 2018-2019;
- Kedua : Indikator Utama sebagaimana dimaksud dictum kedua terdiri dari 3 (tiga) lampiran, yaitu :
- a. Lampiran 1 : Indikator Utama Inspektorat Utama
 - b. Lampiran 2 : Indikator Utama Inspektorat I
 - c. Lampiran 3 : Indikator Utama Inspektorat II



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

- Kedua : Indikator Kinerja Utama menjadi acuan untuk menetapkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja (Lapkin) Satuan Kerja dan Unit Kerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2018-2019;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Maret 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN I

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No : B-HK.04.03.7.03.18.

Tanggal : Maret 2018

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Unit Organisasi | : | Inspektorat Utama
Badan Pengawas Obat dan Makanan |
| 2. Tugas | : | Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. |
| 3. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; 2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama |

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM
2.	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern
3.	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
4.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM
5.	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama
6.	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirfamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

7.	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Maret 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN II

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No : B-HK.04.03.7.03.18.

Tanggal : Maret 2018

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat I
Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat I;
 - b. Penyusunan rencana program pengawasan intern pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat I;
 - c. Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat I;
 - d. Pelaporan hasil pengawasan; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama Inspektorat I:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan
2.	Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern
3.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan
4.	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja
5.	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
6.	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Maret 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN III

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No : B-HK.04.03.7.03.18.

Tanggal : Maret 2018

1. Nama Unit Organisasi : **Inspektorat II
Badan Pengawas Obat dan Makanan**
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat II;
 - b. Penyusunan rencana program pengawasan intern pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat II;
 - c. Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat II;
 - d. Pelaporan hasil pengawasan; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama Inspektorat II:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan system pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan system pengawasan
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan system pengawasan
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan
2.	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai trusted advisor	Indesk kepuasan mitra pengawasan intern
3.	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal
4.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan system pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan system pengawasan
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu
5.	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja
6.	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker bebas dari kesalahan material
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

7.	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Maret 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektur Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Persekutuan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax: 4245139
 Email: infopom@inda.net.id, tuispektorat@pom@gmail.com; Website: www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 INSPEKTORAT BADAN POM Periode : Januari – Februari 2018

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM di susun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%
		Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	73
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	75%
3	Meningkatnya kapuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian surveil kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%
4	Meningkatkan pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10,5
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	80%
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian Intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	80%
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Badan POM	84%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	76%
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase Indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%
7	Meningkatkan Pengelolaan Human Capital management (HCM)	Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja ber kriteria "BAIK"	100%
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34
8	Implementasi QMS	Perolehan Sertifikasi ISO 9001	100%
9	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	81

Kegiatan
 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
 Aparatur Badan POM

Anggaran
 Rp 7.152.902.000

Pihak Kedua,

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.

Pihak Pertama,

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4227756, 42678164, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax : 4245139

Email : fulinspektori@pom@gmail.com, inspektori1@pom.go.id, info@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mustofa, Apt, M.Kes

Jabatan : Inspektur I

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.

Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 September 2018

Pihak Kedua,

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si

Pihak Pertama,

Drs. Mustofa, Apt, M.Kes



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4227756, 42878164, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax: 4245139
 Email : finspektorat1@pom@gmail.com, inspektorat1@pom.go.id, inlapom@inda.net.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 INSPEKTORAT I BADAN POM Periode : Maret-Juli 2018

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Customer Perspektif	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70 %
		Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
2	Internal Perspective Process	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90 %
		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	84
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjut BPOM	75 %
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85 %			
3	Learn & Growth Perspektif	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78

Program
 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
 Tugas Teknis Lainnya BPOM

Anggaran
 Rp. 19.716.697.000

Jakarta 7 Maret 2018

Pihak Kedua,

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si

Pihak Pertama,

Drs. Mustofa, Apt., M.Kes



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4227756, 42878164, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax: 4245139

Email : tinspektorat1@pom.go.id, inspektorat1@pom.go.id, infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 INSPEKTORAT I BADAN POM Periode : Agustus-Desember 2018

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Customer Perspective	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70 %
		Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
2	Internal Perspective Process	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90 %
		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	84
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjut BPOM	75 %
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85 %		
3	Learn & Growth Perspective	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78

Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya BPOM

Anggaran
Rp. 6.435.143.000

Jakarta, September 2018

Pihak Kedua,

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si

Pihak Pertama,

Drs. Mustofa, Apt., M.Kes

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>					
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%	85.71%	122.44%
2	Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	2. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82%	76.27%	93.01%
<i>Internal Process Perspective</i>					
3	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	3. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	90%	100.00%
4	Tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di wilayah Inspektorat I	4. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	84%	92.5%	110.12%
		5. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21	21	100.00%
5	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	6. Persentase laporan keuangan Satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100.00%
		7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	75%	73.45%	97.9%
		8. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	92%	108.23%
<i>Learning and Growth Perspective</i>					
6	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	9. Nilai AKIP	78	75.31	96,55%
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I					
1	Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu/Investigasi/Penelusuran Kasus/TL Pengaduan Inspektorat I	1. Laporan hasil klarifikasi/Audit Tujuan Tertentu/audit investigasi yang disusun	8	8	100%
Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>					
2	Bimbingan Teknis oleh Pimpinan	2. Laporan hasil supervisi, bimbingan teknis, dan perjalanan pimpinan	17	17	100%
3	Dukungan Manajemen Pengawasan Intern Keuangan dan	3. Pengelolaan Human Capital	1	1	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Umum - Program	Management			
Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM program penguatan pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I					
4	Pertemuan Nasional Penguatan Pelaksanaan RB dan Budaya Anti Korupsi	4. Laporan Pertemuan Nasional Penguatan Pelaksanaan RB dan Budaya Anti Korupsi	1	1	100%
5	Rapat Evaluasi dan Perencanaan Strategi Inspektorat Utama	5. Laporan rapat evaluasi dan perencanaan strategi Inspektorat Utama	1	1	100%
Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal					
6	Pertemuan Teknis Manajemen Risiko	6. Laporan Pertemuan Teknis Manajemen Risiko	1	1	100%
7	Pelaksanaan Audit Operasional/ Tematik/Kinerja Inspektorat I	7. Laporan audit operasional yang disusun	12	12	100%
8	Survei Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik	8. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	100%
9	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	9. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang disusun	4	4	100%
Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM yang sesuai SAP					
14	Reviu Laporan Keuangan, RKA-K/L, dan RK-BMN	10. Laporan Hasil Reviu	8	8	100%
15	Pertemuan Pemantauan Progress Penyelesaian TL Temuan BPK	11. Laporan pertemuan pemantauan progress penyelesaian temuan BPK	1	1	100%
16	Lokakarya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergisme Dengan Pelaku Usaha	12. Laporan sarasehan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme dengan pelaku usaha	2	2	100%
17	Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan oleh BPK RI	13. Laporan hasil pendampingan BPK RI	4	4	100%
18	Kerjasama lintas program dan lintas sektor	14. Laporan hasil kerjasama lintas program dan lintas sektor	1	1	100%
19	Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	15. Laporan pemantauan monitoring dan evaluasi	2	2	100%
20	Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Satker Pusat	16. Laporan workshop pengendalian intern atas pelaporan keuangan	1	1	100%
Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019					
21	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan	17. Jumlah laporan akuntabilitas, laporan tahunan, dan laporan pengawasan	3	3	100%
22	Pembuatan kajian/pedoman/peraturan Inspektorat I	18. Kajian/pedoman/peraturan Inspektorat I	1	1	100%
23	Implementasi Quality	19. Laporan hasil audit internal (QMS)	2	2	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Management Systems (QMS)	ISO unit kerja pusat			
24	Dukungan Manajemen	20. Dukungan Manajemen Pengawasan Intern - Subbag I Administrasi Kegiatan	12	12	100%
		21. Dukungan Manajemen Pengawasan Intern - Subbag I Administrasi Keuangan	12	12	100%
		22. Dukungan Manajemen Pengawasan Intern Keuangan dan Umum - Program	1	1	100%
		23. Layanan Internal	1	1	100%
		24. Layanan Perkantoran	12	12	100%

Lampiran 5

CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2018	Realisasi 2018	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
			Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
		<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>							
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai road map RB BPOM 2015 - 2019	Perentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti adalah rasio jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang diberikan.	Jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti	12	Jumlah total rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang diberikan	14	70%	85.71%	122.44
Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama	Survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan	76.27	--		82	76.27	93.01

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2018	Realisasi 2018	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
			Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
		Internal Process Perspective							
Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	<p>Program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.</p> <p>Untuk mengukur pencapaian Program Penguatan Pengawasan digunakan indikator-indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan Gratifikasi. b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). c. Penanganan Pengaduan Masyarakat. d. Penanganan Whistle Blowing System. e. Penanganan Benturan Kepentingan. f. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). h. Fraud Control Plan <p>Nilai RB BPOM program penguatan pengawasan dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN terdiri dari 2 (dua) penilaian yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan 2. Nilai Pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM program pemerintahan yang bersih dan bebas KKN <p>Dihitung dari : (jumlah realisasi rencana aksi/jumlah rencana aksi) x 100%</p>	Realisasi rencana aksi x 100%	10	Rencana aksi	11	90%	90%	100.00
Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	Keandalan SPIP mitra kerja Inspektorat I dinilai dengan melaksanakan verifikasi terhadap pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM EPITE) Evaluasi pengendalian intern dilaksanakan dengan cara melakukan penilaian terhadap penerapan unsur-unsur	Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM EPITE)	92.5%	--		84%	92.5%	110.12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2018	Realisasi 2018	Nilai Pencapaian Sasaran (%)																		
			Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi																					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)																		
		pengendalian intern secara umum pada tingkat unit kerja																									
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	Dihitung dari jumlah Laporan Hasil Pengawasan Intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	21	--	21	21	21	100.00																		
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	Opini atas Laporan Keuangan Badan POM akan memenuhi salah satu opini BPK RI yang terdiri dari : <table border="1" data-bbox="622 619 1126 1034"> <thead> <tr> <th colspan="2">Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM</th> <th>Persentase Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTP</td> <td>: Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>WTP DPP</td> <td>: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>WDP</td> <td>: Wajar Dengan Pengecualian</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>TMP</td> <td>: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Wajar</td> <td>: <i>Adversed Opinion</i></td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM		Persentase Capaian	WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%	WTP DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%	WDP	: Wajar Dengan Pengecualian	95%	TMP	: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%	Tidak Wajar	: <i>Adversed Opinion</i>	50%	Opini atas Laporan Keuangan Badan POM	100%	--	100%	100%	100%	100.00
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM		Persentase Capaian																									
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%																									
WTP DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%																									
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian	95%																									
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%																									
Tidak Wajar	: <i>Adversed Opinion</i>	50%																									
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan memperoleh status 'CLOSE' (Status 1 dan Status 4) / Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan) x 100% Status Tindak Lanjut yang diberikan BPK RI: <table border="1" data-bbox="622 1252 1077 1380"> <tbody> <tr> <td>Status 1</td> <td>: Tindak lanjut telah Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 2</td> <td>: Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 3</td> <td>: Belum Tindak lanjut</td> </tr> </tbody> </table>	Status 1	: Tindak lanjut telah Sesuai Saran	Status 2	: Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran	Status 3	: Belum Tindak lanjut	Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan memperoleh status 'CLOSE' (Status 1 dan Status 4)	--	Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan	--	75%	73.45%	97.9												
Status 1	: Tindak lanjut telah Sesuai Saran																										
Status 2	: Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran																										
Status 3	: Belum Tindak lanjut																										

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional			Pembilang		Penyebut		Target 2018	Realisasi 2018	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
					Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
		Status 4	:	Tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah							
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi pengawasan intern) x 100%			Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti	943	Jumlah total rekomendasi pengawasan intern	1.025	85%	92%	108.23
Learning and Growth Perspective											
Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Inspektorat I			Hasil Evaluasi SAKIP di Inspektorat I		--		78	75.31	96.55

Lampiran 6

**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PER TRIWULAN
INSPEKTORAT I TAHUN 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)/(3)	(12) = (8)/(4)	(13) = (9)/(5)	(14) = (10)/(6)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>													
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Perentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	--	--	--	70%	--	--	--	85.71%	--	--	--	122.4%
Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	--	--	--	82	--	--	--	76.27	--	--	--	93.01%
<i>Internal Process Control</i>													
Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	--	--	90%	90%	--	--	90%	90%	--	--	100%	100%
Tata kelola, manajemen Risiko	Tingkat keandalan SPIP pada mitra	--	--	--	84	--	--	--	92.5	--	--	--	110.12%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1 (11) = (7)/(3)	TW2 (12) = (8)/(4)	TW3 (13) = (9)/(5)	TW4 (14) = (10)/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)/(3)	(12) = (8)/(4)	(13) = (9)/(5)	(14) = (10)/(6)
dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	kerja												
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	5	10	16	21	5	11	17	21	100%	110%	106.25%	100%
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	--	100%	--	100%	--	100%	--	100%	--	100%	--	100%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	--	75%	--	75%	--	73.45%	--	(Menunggu HAPSEM Sem 2)	--	97.93%	--	73.45%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	81.08%	94.19%	84.69%	92%	95.39%	110.81%	99.64%	108.23%
Learning and Growth Perspective													
Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	--	--	--	78	--	--	--	75.31	--	--	--	96.55%

Lampiran 7

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)		
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 - 2019	1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penelusuran Pengaduan					
			1	Audit Tujuan Tertentu/Investigasi/Penelusuran Kasus/TL Pengaduan Inspektorat I	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	82.897.000	81.637.200	98,48
					<u>Output:</u>			
Laporan hasil klarifikasi/audit tujuan tertentu/audit investigasi yang disusun (lap)	8	8	100,00					
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	1	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern					
			1	Perjalanan Pimpinan (Sosialisasi/Bimtek) Inspektur Utama	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	175.115.000	167.288.060	95,53
					<u>Output:</u>			
			Laporan hasil Supervisi, Bimbingan Teknis, dan Perjalanan Pimpinan (lap)	7	7	100,00		
			2	Bimbingan Teknis Perjalanan Pimpinan Inspektorat 1	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	102.900.000	100.165.600	97,34
					<u>Output:</u>			
			Laporan hasil Supervisi, Bimbingan Teknis, dan Perjalanan Pimpinan (lap)	10	10	100,00		
			3	Pengelolaan Human Capital Management	<u>Input:</u>			
Dana (Rp)	219.575.000	219.575.000			100,00			
<u>Output:</u>								
Laporan Penyelenggaraan	1	1	100,00					
3	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	1	Persentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Pengawasan					
			1	Pertemuan Nasional Penguatan Pelaksanaan RB dan Budaya Anti Korupsi	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	511.944.000	452.325.556	88,35
					<u>Output:</u>			
Laporan Pertemuan Nasional Penguatan Pelaksanaan RB dan Budaya Anti Korupsi (lap)	1	1	100,00					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)		
		2	Rapat Evaluasi dan Perencanaan Strategi Utama	<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	271.064.000	169.739.869	62,62		
				<u>Output:</u>					
				Laporan Rapat Evaluasi dan Perencanaan Strategi Utama (lap)	1	1	100,00		
4	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	1	Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja						
			1	Pertemuan Teknis Manajemen Resiko	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	154.523.000	150.397.000	97,33	
					<u>Output:</u>				
				Laporan Pertemuan Teknis Manajemen Resiko (lap)	1	1	100,00		
		2	Jumlah Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja						
			1	Audit Operasional/Tematik/Kinerja Inspektorat I	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	551.010.000	539.033.250	97,83	
					<u>Output:</u>				
					Laporan audit operasional yang disusun (lap)	12	12	100,00	
			2	Survei Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	275.464.000	273.842.900	99,41	
					<u>Output:</u>				
			Laporan hasil survei kepuasan masyarakat (lap)	1	1	100,00			
3	Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)		<u>Input:</u>						
		Dana (Rp)	60.900.000	59.672.560	97,98				
		<u>Output:</u>							
		Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang disusun (lap)	4	4	100,00				
5	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	1	Persentase Laporan Keuangan Satker Yang Bebas dari Kesalahan Material						
			1	Reviu LK/RKA-KL/BMN	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	425.086.000	393.545.890	92,58	
		<u>Output:</u>							

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	
			Laporan Hasil Reviu yang disusun (lap)	8	8	100,00	
		2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM				
		1	Pertemuan pemantauan Progres Penyelesaian TL Temuan BPK	<u>Input:</u> Dana (Rp)	161.995.000	161.773.750	99,86
			<u>Output:</u> Laporan pertemuan pemantauan progress penyelesaian TL Temuan BPK (lap)	1	1	100,00	
		2	Sarasehan efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme dengan pelaku usaha di Semarang	<u>Input:</u> Dana (Rp)	249.158.000	227.881.300	91,46
			<u>Output:</u> Laporan sarasehan efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme (lap)	1	1	100,00	
		3	Lokakarya Efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme dengan pelaku usaha di Bandung	<u>Input:</u> Dana (Rp)	219.948.000	185.314.550	84,25
			<u>Output:</u> Laporan lokakarya efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme (lap)	1	1	100,00	
		4	Pendampingan BPK RI	<u>Input:</u> Dana (Rp)	37.860.000	25.272.436	66,75
			<u>Output:</u> Laporan hasil pendampingan BPK RI (lap)	4	4	100,00	
		5	Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L	<u>Input:</u> Dana (Rp)	47.280.000	33.250.000	70,33
			<u>Output:</u> Laporan hasil kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L terkait (lap)	1	1	100,00	
		3	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)		
		1	Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	88.320.000	80.802.802	91,49		
				<u>Output:</u>					
				Laporan pemantauan monitoring dan evaluasi (lap)	2	2	100,00		
		2	Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan Satker Pusat	<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	61.200.000	51.828.810	84,69		
				<u>Output:</u>					
				Laporan workshop pengendalian intern atas pelaporan keuangan dengan satker pusat (lap)	1	1	100,00		
6	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	1	Nilai AKIP Inspektorat I						
			1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	15.340.000	4.419.811	28,81	
					<u>Output:</u>				
				Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan	3	3	100,00		
			2	Kajian/pedoman/peraturan Inspektorat I	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	37.700.000	26.678.505	70,77	
					<u>Output:</u>				
				Kajian/pedoman/peraturan (lap)	1	1	100,00		
			3	Audit Internal QMS ISO unit kerja pusat (Inspektorat I)	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	1.020.000	846.000	82,94	
					<u>Output:</u>				
				Laporan hasil audit internal QMS ISO unit kerja pusat (lap)	1	1	100,00		
			4	Audit Surveillance QMS ISO unit pusat (Inspektorat I)	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	1.360.000	1.126.000	82,79	
					<u>Output:</u>				
	Laporan hasil audit surveilan QMS ISO unit pusat (Inspektorat I) (lap)	1	1	100,00					
2	Dukungan Manajemen pengawasan intern - Subbag I								

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)		
		1	Administrasi Kegiatan	<u>Input:</u>				
			Dana (Rp)	633.205.000	567.034.038	89,53		
			<u>Output:</u>					
			Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12	100,00		
			2	Administrasi Keuangan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	750.000	750.000	100,00	
		<u>Output:</u>						
		Waktu pelaksanaan (bulan)		12	12	100,00		
		3	Dukungan Manajemen Pengawasan Intern Keuangan dan Umum - Program					
			1	Dukungan Manajemen Pengawasan Intern Keuangan dan Umum - Program	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	1.214.258.000	1.196.300.626	98,52
					<u>Output:</u>			
					Laporan Dukungan Manajemen Pengawasan Intern Keuangan dan Umum - program	1	1	100,00
			2	Layanan Internal	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	110.622.000	110.550.000	99,93
<u>Output:</u>								
Layanan Internal	1				1	100,00		
3	Layanan Perkantoran		<u>Input:</u>					
			Dana (Rp)	2.391.174.000	2.223.043.381	92,97		
			<u>Output:</u>					
		Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12	100,00			

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp8.101.668.000

Realisasi Anggaran : Rp7.504.094.894

Lampiran 8

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2018

No.	Sasaran/ Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		% Input	% Output				
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	98.48%	100%	1.02	1.00	0.02	Efisien
	Audit Tujuan Tertentu/ investigasi/ penelusuran kasus/ pengaduan TL	98.48%	100%	1.02	1.00	0.02	Efisien
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	97.62%	100%	1.02	1.00	0.02	Efisien
	Perjalanan Pimpinan (Sosialisasi/Bimtek) Inspektur Utama	95.53%	100%	1.05	1.00	0.05	Efisien
	Bimbingan Teknis Perjalanan Pimpinan Inspektorat 1	97.34%	100%	1.03	1.00	0.03	Efisien
	Pengelolaan Human Capital Management	100%	100%	1.00	1.00	0.00	Efisien
3	Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM program penguatan pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	75.48%	100%	1.32	1.00	0.32	Efisien
	Pertemuan Nasional Penguatan Pelaksanaan RB dan Budaya Anti Korupsi	88.35%	100%	1.13	1.00	0.13	Efisien
	Rapat Evaluasi dan Perencanaan Strategi Utama	62.62%	100%	1.59	1.00	0.59	Ekstrem Efisien
4	Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	98.13%	100%	1.01	1.00	0.01	Efisien
	Pertemuan Teknis Manajemen Risiko	97.33%	100%	1.03	1.00	0.03	Efisien
	Audit operasional/ Kinerja	97.83%	100%	1.02	1.00	0.02	Efisien
	Survei Kepuasan Masyarakat	99.41%	100%	1.01	1.00	0.01	Efisien
	Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	97,98%	100%	1.02	1.00	0.02	Efisien
5	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM yang sesuai SAP	88.17%	100%	1.13	1.00	0.13	Efisien
	Reviu LK/ RKA-K/L/BMN	92.58%	100%	1.08	1.00	0.08	Efisien
	Pertemuan pemantauan Progres Penyelesaian TL Temuan BPK	99.86%	100%	1.01	1.00	0.01	Efisien
	Sarasehan efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme dengan pelaku usaha di Semarang	91.46%	100%	1.09	1.00	0.09	Efisien
	Lokakarya Efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme dengan pelaku usaha di Bandung	84,25%	100%	1.18	1.00	0.18	Efisien
	Pendampingan BPK	66.75%	100%	1.49	1.00	0.49	Efisien
	Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L	70.33%	100%	1.42	1.00	0.42	Efisien
	Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	91.49%	100%	1.09	1.00	0.09	Efisien
	Workshop pengendalian intern atas pelaporan keuangan	84.69%	100%	1.18	1.00	0.18	Efisien
6	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	76,20%	100%	1.31	1.00	0.31	Efisien

No.	Sasaran/ Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		% Input	% Output				
	Laporan akuntabilitas, laporan tahunan, dan laporan pengawasan	28.81%	100%	3.47	1.00	2.47	Ekstrem Efisien
	Kajian/pedoman/peraturan Inspektorat I	70,77%	100%	1.41	100	0.41	Efisien
	Audit internal QMS ISO unit kerja pusat (Inspektorat I)	82,94%	100%	1.22	1.00	0.22	Efisien
	Audit surveillance QMS ISO unit pusat (Inspektorat I)	82,79%	100%	1.20	1.00	0.20	Efisien
	Dukungan Manajemen Pengawasan Intern - Subbag I	94.77%	100%	1.06	1.00	0.06	Efisien
	Dukungan Manajemen Pengawasan Intern Keuangan dan Umum - Program	97.14%	100%	1.01	1.00	0.01	Efisien
Jumlah		89.01%	100%				

Lampiran 9**REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN MITRA
INSPEKTORAT I 2018**

Dimensi Quality Service	Variabel Indikator		Skor	Indeks
Wujud Fisik (Tangible)	1	Penyajian Laporan Hasil Audit	76.36%	73.64%
	2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Audit	72.73%	
	3	Rumusan Temuat Audit	72.73%	
	4	Rumusan Penyebab Temuan	72.73%	
Keandalan (Reliability)	1	Kecakapan tim audit dalam melaksanakan audit	72.00%	76.69%
	2	Pemahaman tim tentang peraturan perundang-undangan yang terkait sasaran audit	74.55%	
	3	Relevansi penetapan ruang lingkup dengan tujuan audit	76.36%	
	4	Pengetahuan tim audit tentang teknis kegiatan yang diaudit	76.36%	
	5	Kesesuaian lamanya audit dengan beban kerja audit	74.55%	
	6	Kejelian tim audit dalam mengidentifikasi masalah	74.55%	
	7	Manfaat entry meeting dalam menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan sasaran audit	81.82%	
	8	Temuan audit membantu auditi meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur	80.00%	
	9	Temuan auditor meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional organisasi	80.00%	
Kesigapan (Responsiveness)	1	Ketepatan tim audit dalam memberikan solusi atau pemecahan masalah	70.91%	75.45%
	2	Respon tim audit dalam menerima informasi dari obyek audit dalam entry meeting	76.36%	
	3	Rumusan rekomendasi audit membantu peningkatan kinerja dan mencegah temuan audit eksternal (BPK)	80.00%	
	4	Waktu yang tersedia untuk memberikan tanggapan terhadap Daftar Temuan Hasil Audit	72.73%	
	5	Manfaat pemantauan tindak lanjut oleh Tim Inspektorat terhadap percepatan penuntasan tindak lanjut	78.18%	
	6	Sinergi antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (BPKP dan Inspektorat Utama)	74.55%	
Jaminan (Assurance)	1	Penyajian temuan auditor dilakukan secara objektif	76.36%	76.97%
	2	Auditor dapat menjaga kerahasiaan data informasi audit	76.36%	
	3	Kemampuan tim audit berinteraksi pada saat audit	78.18%	
Empati (Empathy)	1	Auditor memahami kebutuhan organisasi auditi	76.36%	78.56%
	2	Tim Audit dalam mendorong PNS agar dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	78.18%	
	3	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi sebagai <i>watchdog</i> (ketaatan)	80.00%	
	4	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsinya sebagai konsultan pelaksanaan program dan anggaran	76.00%	
	5	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsinya memberikan keyakinan yang mamdai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah melalui audit, reviu,	80.00%	

Dimensi Quality Service	Variabel Indikator		Skor	Indeks
		pendampingan, evaluasi, dll (Assurance)		
	6	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Risk Management)	72.73%	
	7	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsinya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Accountability)	81.82%	
	8	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsinya sebagai penanggungjawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penguatan Pengawasan (Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Benturan Kepentingan, Koordinator WBK/WBBM)	83.64%	

Lampiran 10**Rekapitulasi Hasil PM-EPITE Tahun 2017 dan 2018****Unit Kerja di Lingkup Wilayah Inspektorat I**

Unit SOTK Lama	Nilai 2017	Unit SOTK Baru	Nilai 2018
Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi	91.00	Direktorat Registrasi Obat	94.00
Direktorat Standardisasi Produk Terapeutik dan PKRT	97.00	Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	97.00
Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT	89.00	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	89.00
Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT	97.00	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	97.00
Direktorat Pengawasan NAPZA	96.00	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	96.00
Direktorat Penilaian OT, Suplemen Makanan dan Kosmetik	92.00		
Direktorat Standardisasi OT, Kosmetik dan Produk Komplemen	97.00		
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan Produk Komplemen	97.50		
Direktorat Obat Asli Indonesia	91.00		
Direktorat Penilaian Keamanan Pangan			
Direktorat Standardisasi Produk Pangan	85.00		
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	83.00		
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya			
Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan			
Biro Umum	87.00	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	87.00
		Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan	
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	94.00	Biro Hukum dan Organisasi	95.00
		Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan	
Biro Perencanaan dan Keuangan	88.00	Biro Perencanaan dan Keuangan	91.00
Biro Kerja Sama Luar Negeri		Biro Kerja Sama	
Pusat Penyidikan Obat dan Makanan			

Unit SOTK Lama	Nilai 2017	Unit SOTK Baru	Nilai 2018
Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional	95.00	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	95.00
Pusat Informasi Obat dan Makanan	98.00	Pusat Data dan Informasi	99.00
Pusat Riset Obat dan Makanan	95.00	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	89.00
BBPOM di Banda Aceh		BBPOM di Banda Aceh	98.00
BBPOM di Medan	92.00		
BBPOM di Padang	97.00		
BBPOM di Pekanbaru	90.00	BBPOM di Pekanbaru	90.00
BPOM di Jambi	83.00	BPOM di Jambi	88.00
BBPOM di Palembang	93.00	BBPOM di Palembang	93.00
BPOM di Pangkal Pinang	97.00		
BPOM di Batam	93.00		
BPOM di Bengkulu	92.00		
BBPOM di Bandar Lampung	86.00	BBPOM di Bandar Lampung	88.00
BPOM di Serang	87.00		
BBPOM di Jakarta		BBPOM di Jakarta	96.00
BBPOM di Bandung	90.00	BBPOM di Bandung	90.00
BBPOM di Semarang			
BBPOM di Yogyakarta	92.00		
BBPOM di Surabaya	99.50	BBPOM di Surabaya	100.00
BBPOM di Denpasar	93.00		
BBPOM di Mataram	93.00	BBPOM di Mataram	93.00
BPOM di Kupang	86.00	BPOM di Kupang	86.00
BBPOM di Pontianak	91.00		
BPOM di Palangka raya	87.27	BBPOM di Palangka Raya	94.00
BBPOM di Banjarmasin	72.00		
BBPOM di Samarinda	99.50	BBPOM di Samarinda	100.00
BBPOM di Manado			
BPOM di Gorontalo	87.50	BPOM di Gorontalo	95.00
BPOM di Palu	93.00	BPOM di Palu	94.00
BPOM di Kendari	99.00		
BBPOM di Makassar		BBPOM di Makassar	
BPOM di Ambon	78.00		
BPOM di Manokwari	97.00	BPOM di Manokwari	82.00
BBPOM di Jayapura			
BPOM di Sofifi	92.00		
BPOM di Mamuju			
Inspektorat	85.00	Inspetorat 2	87.00
Rata-Rata	91.30	Rata-Rata	92.50

Lampiran 11

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018
di lingkup wilayah Inspektorat I**

No	Nama Unit	Rincian Nilai					Total Nilai
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	
1	Sekretariat Utama	25.13	16.88	12.21	5.31	13.83	73.36
2	Biro Umum dan SDM	25.81	16.88	11.05	6.45	13.09	73.29
3	Biro Kerja Sama	26.40	15.31	12.04	5.58	13.25	72.58
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	24.86	19.06	11.86	6.85	10.75	73.38
5	Biro Hukor dan Biro HDSP	22.98	14.06	11.14	6.08	15.06	69.32
6	Kedeputian I	24.05	13.75	13.56	6.48	16.63	74.47
7	Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP	24.21	12.19	13.56	7.10	15.00	72.06
8	Direktorat Registrasi Obat	22.73	15.31	11.59	6.29	16.00	71.92
9	Direktorat Standardisasi ONPPZA	25.04	15.00	11.59	6.00	17.13	74.76
10	Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	25.34	15.21	12.13	6.79	11.50	70.97
11	Direktorat KMEI ONPPZA	24.66	15.63	12.31	7.43	13.13	73.16
12	Inspektorat	24.73	15.63	13.56	6.69	14.71	75.31
13	PRKOM	24.53	17.50	10.15	6.12	14.06	72.36
14	PPPOMN	25.10	16.25	11.82	4.87	15.40	73.44
15	Pusat Data dan Informasi	24.21	15.63	12.04	4.70	17.31	73.89
16	Balai Besar POM di Banda Aceh	26.33	15.94	10.55	7.44	10.46	70.72
17	Balai Besar POM di Pekanbaru	25.11	16.56	11.06	6.06	13.67	72.46
18	Balai Besar POM di Palembang	25.62	15.00	12.41	4.70	14.06	71.79
19	Balai POM di Jambi	24.10	18.75	13.83	3.27	12.17	72.11
20	Balai Besar POM di Bandar Lampung	24.02	17.19	12.49	6.85	13.71	74.26
21	Balai Besar POM di Jakarta	25.57	16.25	10.78	6.58	13.54	72.72
22	Balai Besar POM di Bandung	25.74	16.25	13.34	7.14	13.33	75.80
23	Balai Besar POM di Surabaya	27.27	17.50	11.87	6.85	14.42	77.91
24	Balai Besar POM di Mataram	25.71	15.94	12.49	5.99	15.63	75.76
25	Balai POM di Gorontalo	23.88	13.75	13.38	6.48	15.50	72.98
26	Balai Besar POM di Makassar	25.66	15.00	13.03	7.06	13.02	73.77
27	Balai POM di Palu	24.78	15.63	12.68	6.70	13.33	73.11
28	Balai Besar POM di Samarinda	26.72	16.88	12.49	6.10	12.42	74.61
29	Balai Besar POM di Palangkaraya	26.74	16.88	11.42	5.83	13.96	74.82
30	Balai Besar POM di Kupang	27.02	16.88	12.14	6.62	12.79	75.44
31	Balai POM di Manokwari	24.95	14.69	11.01	6.06	14.21	70.92

Lampiran 12

**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Pada Unit Pelayanan Publik di BPOM Tahun 2018**

Unit Pelayanan	Nilai SKM
Dit. Registrasi Obat	77,66
Dit. Pengawasan Produksi Obat, NPP	81,22
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP	85,11
Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	81,43
Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	80,30
Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	86,13
Dit. Pengawasan Kosmetik	87,85
Dit. Standardisasi Pangan Olahan	80,53
Dit. Registrasi Pangan Olahan	83,08
Dit. Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	79,45
Dit. Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	79,17
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	78,21
Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan	77,05
Balai Besar POM Di Banda Aceh	76,98
Balai Besar POM Di Medan	82,50
Balai Besar POM Di Padang	76,74
Balai Besar POM Di Pekanbaru	89,10
Balai Besar POM Di Palembang	76,91
Balai Besar POM Di Bandar Lampung	84,64
Balai Besar POM Di Jakarta	79,63
Balai Besar POM Di Bandung	78,84
Balai Besar POM Di Semarang	80,78
Balai Besar POM Di Yogyakarta	81,48
Balai Besar POM Di Surabaya	87,04
Balai POM Di Serang	85,71
Balai Besar POM Di Denpasar	86,39
Balai Besar POM Di Mataram	82,18
Balai Besar POM Di Pontianak	79,17
Balai POM Di Palangka Raya	83,63
Balai Besar POM Di Banjarmasin	82,47
Balai Besar POM Di Samarinda	84,95
Balai Besar POM Di Manado	80,69
Balai Besar POM Di Makassar	79,11
Balai Besar POM Di Jayapura	79,72
Balai POM Di Jambi	86,51
Balai POM Di Bengkulu	86,18
Balai POM Di Batam	81,72
Balai POM Di Kupang	82,87
Balai POM Di Palu	84,47
Balai POM Di Kendari	80,17

Unit Pelayanan	Nilai SKM
Balai POM Di Ambon	82,64
Balai POM Di Pangkalpinang	83,70
Balai POM Di Gorontalo	88,74
Balai POM Di Manokwari	78,06

Lampiran 13

**Monitoring Status Temuan Audit Inspektorat Badan POM
Tahun Audit 2013 s.d. Tahun 2017 Per 31 Des 2018**

No.	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
1	BBPOM di Aceh	2013	8	20	20	0	0	4,905,133.00	4,905,133.00	-
		2014	6	17	17	0	0	6,605,000.00	6,605,000.00	-
		2016	5	18	18	0	0	24,372,121.35	24,372,121.35	-
		2017	4	9	7	2	0	-	-	-
		2017	2	5	3	2	0	-	-	-
		2018	6	16	15	1	0	-	-	-
2	BBPOM di Pekanbaru	2013	6	15	15	0	0	22,593,463.00	22,593,463.00	-
		2015	4	11	10	1	0	42,248,600.00	40,710,600.00	1,538,000.00
		2016	5	14	13	1	0	44,600,000.00	12,600,000.00	32,000,000.00
		2017	3	11	11	0	0	2,568,095.00	2,568,095.00	-
		2018	3	8	8	0	0	-	-	-
3	BBPOM di Palembang	2013	8	17	17	0	0	19,600,000.00	19,600,000.00	-
		2014	8	24	24	0	0	99,024,825.00	99,024,825.00	-
		2016	5	16	16	0	0	12,949,200.00	12,949,200.00	-
		2018	4	14	13	2	0	5,002,425.00	5,002,425.00	-
4	BPOM di Jambi	2013	8	19	19	0	0	17,269,710.00	17,269,710.00	-
		2014	8	17	17	0	0	9,636,200.00	9,636,200.00	-
		2015	5	13	13	0	0	24,687,000.00	24,687,000.00	-
		2016	6	15	15	0	0	52,853,400.00	52,853,400.00	-
		2017	3	7	7	0	0	4,390,000.00	4,390,000.00	-
		2018	9	14	10	4	0	285,000.00	285,000.00	-
5	BBPOM Bandarlampung	2013	7	21	21	0	0	17,222,280.00	17,222,280.00	-
		2015	7	17	17	0	0	10,366,000.00	10,366,000.00	-
		2016	9	20	20	0	0	10,098,356.67	10,098,357.00	(0.33)
		2017	4	16	15	1	0	2,577,044.00	2,577,044.00	-
		2018	6	17	8	9	0	900,000.00	900,000.00	-
6	BBPOM di Jakarta	2014	9	24	24	0	0	24,973,850.00	24,973,850.00	-
		2016	7	7	7	0	0	-	-	-

No.	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
7	BBPOM di Bandung	2018	6	11	0	0	11	-	-	-
		2014	6	15	15	0	0	110,339,378.00	110,339,378.00	-
		2016	7	18	18	0	0	1,367,294.00	1,367,294.00	-
8	BBPOM di Surabaya	2014	8	23	23	0	0	34,826,850.00	34,826,850.00	-
		2015	4	9	9	0	0	37,982,256.00	37,982,256.00	-
		2016	3	8	8	0	0	-	-	-
		2018	7	17	11	5	1	209,700.00	-	209,700.00
9	BBPOM di Mataram	2014	6	14	14	0	0	75,879,500.00	75,879,500.00	-
		2016	6	14	14	0	0	4,692,400.00	4,692,400.00	-
		2018	8	14	14	0	0	13,305,989.00	13,306,889.00	(900.00)
10	BPOM di Kupang	2013	7	13	13	0	0	79,627,753.00	79,627,753.00	-
		2014	7	16	16	0	0	181,605,000.00	181,605,000.00	-
		2015	4	8	8	0	0	15,499,840.00	15,499,840.00	-
		2016	5	12	12	0	0	1,750,000.00	1,750,000.00	-
		2017	4	9	9	0	0	12,619,946.00	12,619,946.00	-
		2018	6	11	8	2	1	-	-	-
11	BPOM di Palangkaraya	2013	6	17	17	0	0	7,440,538.00	7,440,538.00	-
		2015	4	14	14	0	0	182,401,096.00	182,401,096.00	-
		2016	7	11	11	0	0	6,870,400.00	6,870,400.00	-
12	BBPOM di Samarinda	2013	7	14	14	0	0	3,846,400.00	4,063,400.00	(217,000.00)
		2014	8	18	18	0	0	16,579,548.00	16,579,548.00	-
		2015	5	9	9	0	0	10,292,450.00	10,350,640.00	(58,190.00)
		2017	2	6	6	0	0	-	-	-
13	BPOM di Palu	2013	7	18	18	0	0	13,803,050.00	13,803,050.00	-
		2014	9	23	23	0	0	34,749,000.00	34,749,000.00	-
		2015	5	11	11	0	0	3,320,800.00	3,320,800.00	-
		2016	7	14	14	0	0	-	-	-
		2017	5	13	13	0	0	-	-	-
		2018	6	10	10	0	0	560,000.00	560,000.00	-
14	BBPOM di Makassar	2015	3	6	6	0	0	7,371,160.00	7,371,160.00	-
		2016	6	9	7	2	0	21,913,512.00	21,913,512.00	-
		2017	3	9	9	0	0	43,154,208.00	43,154,208.00	-
		2018	7	15	12	1	2	3,965,869.00	3,965,869.00	-

No.	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
15	BPOM di Gorontalo	2014	8	22	22	0	0	19,517,985.00	19,517,985.00	-
		2015	4	10	9	1	0	13,537,005.00	3,907,705.00	9,629,300.00
		2016	7	15	15	0	0	-	-	-
		2018	5	13	10	2	1	-	-	-
16	BBPOM di Manokwari	2013	9	17	17	0	0	29,512,627.00	29,512,627.00	-
		2015	4	18	16	2	0	25,035,170.00	25,035,170.00	-
		2017	5	16	15	1	0	7,805,600.00	2,028,700.00	5,776,900.00
		2018	6	16	12	4	0	8,603,490.00	8,603,490.00	-
17	Dit. Was Distribusi Obat dan Nappza	2015	4	4	4	0	0	-	-	-
18	Dit. Registrasi Obat	2016	2	5	2	0	3	-	-	-
19	Dit. Was Napza	2016	5	9	9	0	0	-	-	-
20	Biro Hukor	2016	4	13	3	0	10	9,244,890.00	9,244,890.00	-
		2018	3	5	2	3	0	-	-	-
21	PPPOMN	2018	2	8	1	7	0	-	-	-
22	Biro Humas dan DSP	2018	3	3	2	1	0	-	-	-
	Jumlah		427	1,025	943	54	29	1,498,958,407.02	1,450,080,597.35	48,877,809.67
	Persentase				92.00%	5.27%	2.83%		96.74%	3.37%

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4227756